



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *SDG's (Sustainable Development Goals)* pada tujuan ke 4 (empat) yaitu "Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua" serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendidikan perlu melaksanakan program Pendidikan Untuk Semua (PUS);
- b. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Semarang yang terstruktur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Perencanaan Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENDIDIKAN UNTUK SEMUA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018-2021.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua;
- c. BAB III : Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. BAB IV : Pendidikan Dasar;
- e. BAB V : Pendidikan Keaksaraan;
- f. BAB VI : Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*);
- g. BAB VII : Pendidikan Holistik Berbasis Karakter;
- h. BAB VIII : Mutu Guru;
- i. BAB IX : Belanja Publik untuk Pendidikan; dan
- j. BAB X : Penutup.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan Pendidikan Untuk Semua secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penyusunan rencana kerja bidang pendidikan di Kabupaten Semarang.

Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Semarang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua yang meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Forum Pendidikan Untuk Semua untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua secara berkala.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 07-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

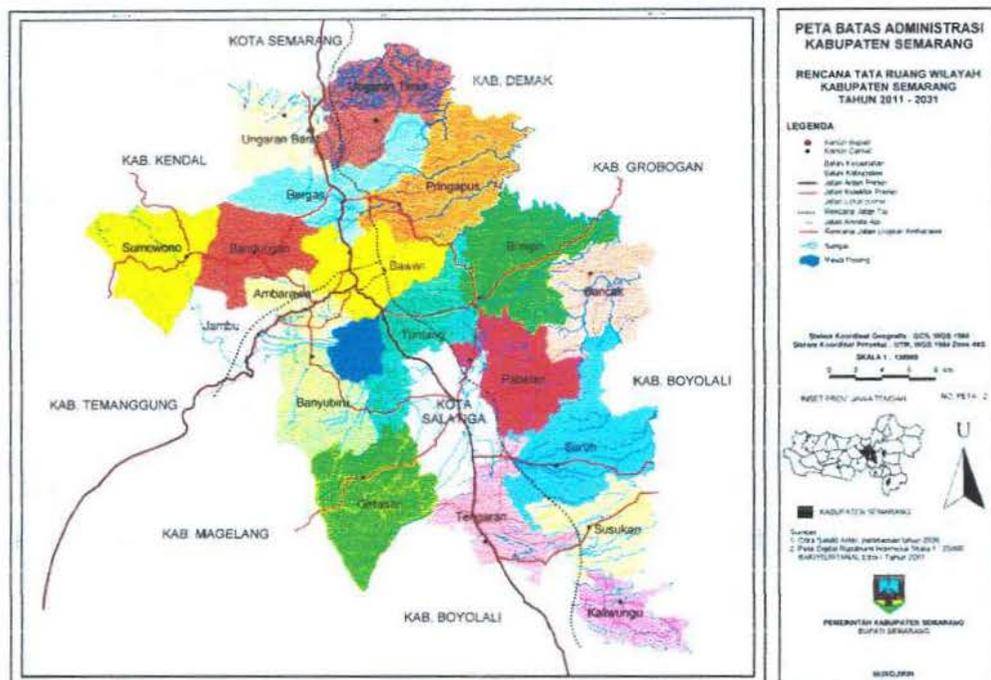
BAB I PENDAHULUAN

A. Situasi dan Kondisi Daerah

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 950,21 km² atau sekitar 2,92 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Semarang mempunyai 19 kecamatan dan terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pringapus (78,355 km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa (28,22 km²).



Sumber : Barenlitbangda Kabupaten Semarang, 2017

Gambar I.1
Peta Administrasi Kabupaten Semarang

Wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang,
 - Sebelah timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali,
 - Sebelah selatan: Kabupaten Boyolali,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sedangkan di tengahnya terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawapening.

Letak Kabupaten Semarang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Semarang yang terletak di antara jalur ke Solo, jalur ke Yogyakarta dan di tengah Provinsi Jawa Tengah.

Luas masing-masing kecamatan, luas daerah, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Semarang disajikan dalam Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1
Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	% Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Getasan	65,80	6,92	37	1086
2.	Tengaran	47,30	4,98	38	741
3.	Susukan	48,86	5,14	46	516
4.	Kaliwungu	29,95	3,15	49	384
5.	Suruh	64,01	6,74	33	571
6.	Pabelan	47,98	5,05	30	472
7.	Tuntang	56,24	5,92	17	504
8.	Banyubiru	54,41	5,73	22	478
9.	Jambu	51,63	5,43	23	495
10.	Sumowono	55,63	5,85	22	955
11.	Ambarawa	28,22	2,97	18	532
12.	Bandungan	48,23	5,08	16	915
13.	Bawen	46,57	4,90	12	534
14.	Bringin	61,89	6,51	25	348
15.	Bancak	43,85	4,61	36	144
16.	Pringapus	78,35	8,25	12	376
17.	Bergas	47,33	4,98	7	490
18.	Ungaran Barat	35,96	3,78	3	460
19.	Ungaran Timur	37,99	3,99	5	339
	Total	950,21	133,98	451	10340

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

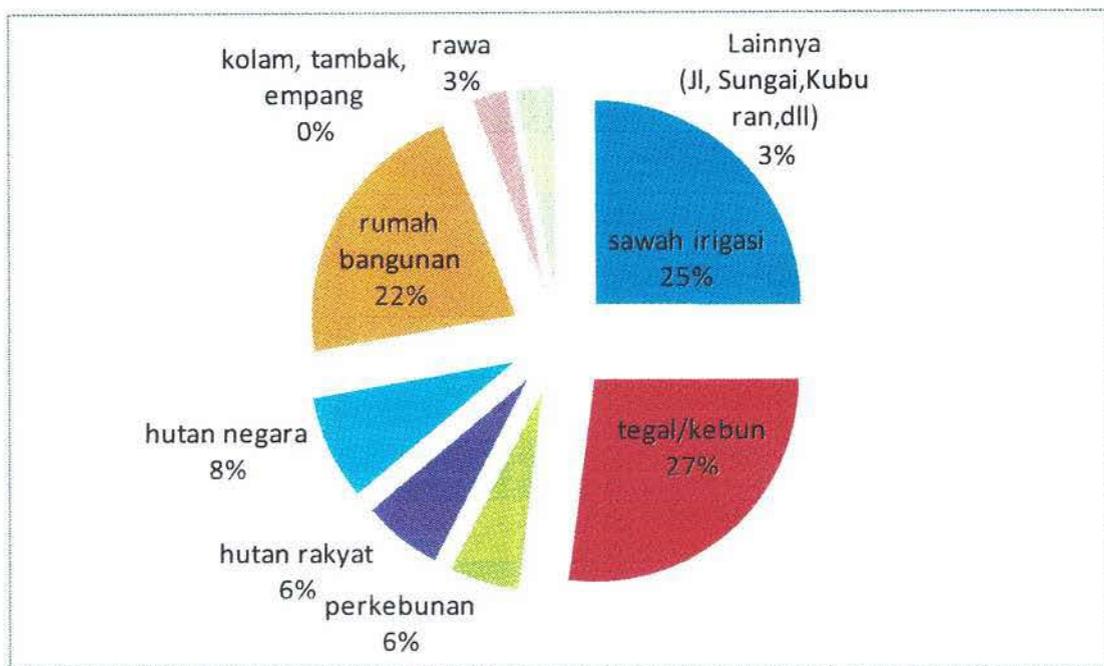
2. Topografi

Wilayah Kabupaten Semarang secara umum merupakan dataran tinggi yang dikelilingi gunung-gunung (Ungaran, Merbabu, Telomoyo, dan Sumbing). Topografi datar 6.169 ha, bergelombang 57.659 ha, curam 21.725 ha dan sangat curam 9.467,674 ha. Ketinggian wilayah antara 318 m dpl - 1450 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 544,21 m di atas permukaan laut.

Variasi wilayah di Kabupaten Semarang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Semarang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Semarang seperti kegiatan industri, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Semarang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

3. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data BPS tahun 2017, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Semarang mencakup Lahan Pertanian seluas 60.818,65 ha dan Lahan Bukan Pertanian seluas 34.202,02 ha. Lahan Pertanian terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 23.745,96 ha dan lahan bukan sawah seluas 37.072,69 ha. Peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 17.141,05 ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 6,604,91 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2017 disajikan dalam Gambar 1.3.



Gambar 1.3
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Semarang Tahun 2017

Peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 25.562,04 ha, perkebunan seluas 5.205,01 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6.032,77 ha, hutan negara 7.849,43 ha. Kolam, tambak, empang 11,65 ha, rawa 2623 ha, dan lainnya (jalan, sungai, kuburan, dll) 2812,96 ha.

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Semarang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan tegal/kebun sebesar 27%, disusul dengan lahan sawah irigasi sebesar 25%. Oleh karena itu sektor tegal/kebun dan sawah irigasi dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Perkembangan penggunaan lahan selama kurun waktu 2013-2017 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.3. sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 (ha)

Penggunaan Lahan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. Lahan Pertanian					
Lahan Sawah	23919,51	23918,65	23918,65	23896,71	23745,96
1. Berpengairan beririgasi	16602,72	16602,12	16602,45	17269,45	17141,05
2. Tadah Hujan	7316,79	7316,53	7316,53	6627,26	6604,91
Lahan Bukan Sawah					
1. Tegak/Kebun	24189,55	24188,47	24188,47	25009,64	25562,04
2. Perkebunan	6988,11	6987,80	6987,80	5271,51	5205,01
3. Hutan Rakyat	4997,72	4997,49	4997,49	5294,67	6032,77
4. Kolam / Empang	25,25	25,25	25,25	25,27	11,65
5. Lainnya	159,44	159,43	159,43	374,69	261,22
B. Lahan Bukan Pertanian	34741,09	34743,57	34743,57	35148,18	34202,02
1. Rumah, Bangunan	20675,22	20675,49	20677,49	21472,44	20916,63
2. Hutan Negara	8693,06	8693,06	8693,06	8693,06	7849,43
3. Rawa	2467,09	2467,09	2467,09	2467,09	2623,00
4. Lainnya (Jalan, sungai, kuburan, dll)	34741,09	34743,57	34743,57	35148,19	3202,02
Jumlah	185516,64	185518,52	185520,85	186698,16	153357,71

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014-2017

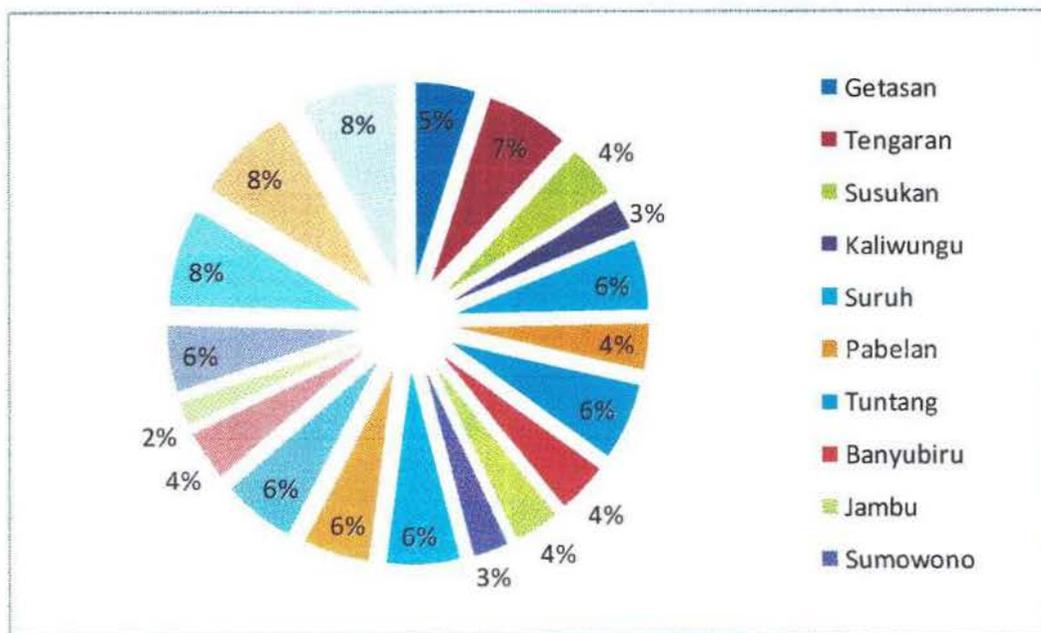
Berdasarkan profil penggunaan lahan di atas maka lahan Tegak/ Kebun merupakan sumber daya lahan paling besar (27 persen) di Kabupaten Semarang yang menandakan bahwa kegiatan tegak/ kebun yang dominan berkembang adalah kegiatan pertanian bukan sawah.

Apabila diperbandingkan antara luasan lahan pertanian lahan basah dengan luasan lahan pertanian lahan kering, luasan lahan pertanian lahan kering lebih sempit dibandingkan luasan lahan pertanian lahan basah.

4. Demografi

Penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.027.489 jiwa, jumlah ini meningkat 13.291 jiwa atau 1,29% dibanding tahun 2016. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2016 sebanyak 1.014.198 jiwa.

Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan pada Tahun 2017, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Ungaran Barat (2.379 orang/km²), Kecamatan Ambarawa (2.379 orang/km²), dan Kecamatan Ungaran Timur (2.162 orang/km²). Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 1.4. berikut :



Gambar 1.4
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017, selengkapnya tersaji pada Tabel 1.4. berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Getasan	29400	49823	50227	50625	51029
2.	Tengaran	67336	68326	69301	70273	71254
3.	Susukan	43653	43771	43869	43995	44013
4.	Kaliwungu	26517	26558	26588	26614	26650
5.	Suruh	60074	60168	60235	60286	60409
6.	Pabelan	38464	38816	39153	39486	39790
7.	Tuntang	62797	63549	64280	65008	65865
8.	Banyubiru	41531	41927	42308	42681	43105
9.	Jambu	37793	38165	38523	38876	39248
10.	Sumowono	30213	30361	30496	30625	30792
11.	Ambarawa	60282	60881	61459	62025	62651
12.	Bandungan	54695	55366	56020	56667	57229
13.	Bawen	57607	58815	60021	61240	62231
14.	Bringin	41990	42277	42546	42804	43069
15.	Bancak	20134	20166	20205	20205	20094
16.	Pringapus	53316	55363	54452	56452	57344
17.	Bergas	75117	77503	82412	82412	85022
18.	Ungaran Barat	79053	80659	83875	83875	85557
19.	Ungaran Timur	74143	76103	80089	80089	82137
	Jumlah	974115	987597	1000887	1014198	1027489

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014 -2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan antara Tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah 8,74 persen.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ungaran Barat, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bancak. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Semarang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Ungaran, Bergas, Bawen. Kepadatan penduduk menurut kecamatan selengkapnya sebagaimana terlihat pada Tabel 1.5. berikut:

Tabel 1.5
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Getasan	65,80	744	748	751	769	776
2	Tengaran	47,30	1367	1372	1379	1.486	1506
3	Susukan	48,87	888	888	890	899	901
4	Kaliwungu	29,95	881	882	884	889	890
5	Suruh	64,02	942	942	942	942	944
6	Pabelan	47,97	788	793	796	823	829
7	Tuntang	56,24	1098	1103	1112	1.156	1171
8	Banyubiru	54,41	751	755	759	784	792
9	Jambu	51,63	726	730	734	753	760
10	Sumowono	55,63	549	556	561	551	554
11	Ambarawa	28,22	2090	2097	2112	2.198	2220
12	Bandungan	48,23	1124	1132	1140	1175	1187
13	Bawen	46,57	1202	1223	1243	.315	1336
14	Bringin	61,89	668	672	675	692	696
15	Bancak	43,85	457	458	463	461	458
16	Pringapus	78,35	653	657	661	721	732
17	Bergas	47,33	1483	1497	1509	1.741	1796
18	Ungaran Barat	35,96	2119	2140	2162	2.332	2379
19	Ungaran Timur	37,99	1833	1836	1840	2.108	2162
Kabupaten		950,21	1000	1006	1012	1.067	1081

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014-2017

Pada Tahun 2017, Kabupaten Semarang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 91,56 %. Adapun penduduk usia non produktif Kabupaten Semarang adalah sebesar 8,44 % dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 1.6. dibawah ini :

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2013 – 2017 (Jiwa)

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 14	227.100	228.461	229.873	234.423	234.515
15 - 64	611.318	653.785	657.912	696.556	706.241
65+	72.819	73.235	73.636	83.219	86.733

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2014-2017

B. Gambaran Umum Tingkat Pembangunan Daerah

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Salah satu metode untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup. Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Semarang pada tahun 2017 mencapai 73,20 yang menjadikan Kabupaten Semarang masuk kategori ‘tinggi’. Menurut klasifikasi yang ditetapkan BPS capaian IPM dengan nilai antara $70 \leq \text{IPM} < 80$ masuk kategori pembangunan manusianya tinggi. Capaian dengan nilai $\text{IPM} < 60$ termasuk ‘rendah’. Capaian nilai IPM berkisar $60 \leq \text{IPM} < 70$ termasuk ‘sedang’. Apabila nilai IPM berkisar $\text{IPM} \geq 80$ masuk dalam kelas pembangunan manusianya ‘sangat tinggi’.

Nilai IPM Kabupaten Semarang menduduki posisi ke - 3 se eks Karesidenan Semarang setelah Kota Salatiga yang berada pada urutan 3 dan Kota Semarang yang berada pada urutan pertama. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang berada pada urutan ke 11.

Tabel 1.7
Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Semarang
Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM		Peringkat Semarang		Peringkat Jateng	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Kota Semarang	81,19	82,01	1	1	1	1
2	Kota Salatiga	81,14	81,68	2	2	2	2
3	Kabupaten Semarang	72,40	73,20	3	3	11	11
4	Kabupaten Kendal	70,11	70,62	4	4	17	17
5	Kabupaten Demak	70,10	70,41	5	5	18	18
6	Kabupaten Grobogan	68,52	68,87	6	6	22	22

Sumber : BPS Kab. Semarang 2017

Nilai dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten Semarang Tahun 2017, sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup (tahun) : 75,57
- Harapan Lama Sekolah (persen) : 12,84
- Rata-rata Lama Sekolah (tahun) : 7,87
- Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Rp 000) : 11.389

Secara umum, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Semarang berada di urutan ke-3 se-eks Karesidenan Semarang. Harapan Lama Sekolah pada urutan ke-3 Rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-3 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-3. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat ke-11. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota se eks Karesidenan Semarang menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup”

dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan taraf kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Semarang Tahun 2017 adalah 75,57 tahun. Artinya, pada Tahun 2017 seorang penduduk Kabupaten Semarang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 75 hingga 76 tahun. Selama periode empat tahun terakhir Angka Harapan Hidup di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, yaitu dari 75,5 tahun pada Tahun 2014 menjadi 75,57 tahun di Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2017 memiliki harapan untuk terus hidup bertambah tahun dibanding tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah. Sampai Tahun 2017 Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang secara umum ada diatas Angka Harapan Hidup Jawa Tengah (74,08).

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan dengan cara merawatnya yang cukup tinggi.

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Harapan Lama Sekolah (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang Semarang indikator tersebut.

Secara nasional ditargetkan pada Tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan. baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut, dan angka melek huruf yang terus mendekati angka 100 persen menjadi pertimbangan sehingga dalam pengukuran nilai indeks pembangunan manusia indicator tersebut diganti dengan angka harapan lama sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Semarang telah meningkat sebesar 12,84 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 7,87 tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh mencapai 1,56 persen per tahun. Meskipun berbeda tipis sebesar 1,56 persen, namun angka tersebut berhasil melampaui angka rata-rata pertumbuhan tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu 12,57 Tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Semarang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Di tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Semarang telah mencapai 12,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan Diploma I.

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung. dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah Kabupaten Semarang Tahun 2017 yang baru mencapai 7,87 tahun. Meskipun angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7.27 tahun). namun bila diamati se eks Karesidenan Semarang lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Semarang terletak pada urutan yang 3 setelah Kota Semarang yang sebesar 10,50 tahun dan Kota Salatiga yang sebesar 10,15 tahun.

Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,87 tahun dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Semarang telah menempuh pendidikan selama 7 hingga 8 tahun atau setara menduduki bangku kelas II (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Semarang periode 2014-2017 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini antara lain adalah: kemiskinan, berpindahnya penduduk Kabupaten Semarang yang berpendidikan tinggi ke daerah lain serta faktor budaya. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi biaya pendidikan, khususnya bagi penduduk miskin, karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Semarang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini.

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula. dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampuan daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah. produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila Semarang orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Penghitungan daya beli diperoleh dari penghitungan Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Semarang pada Tahun 2016 sebesar Rp. 925.166,70 per bulan, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 11.389.000,00 per tahun atau Rp 949.083,30 per bulan. Angka ini masih lebih tinggi daripada Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 1.8
Nilai Komponen-Komponen IPM
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2016

No	Komponen	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,48	75,50	75,52	75,54	75,57
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	12,81	12,82	12,83	12,84
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,28	7,31	7,33	7,48	7,87
4.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	10.562	10.586	10.778	11.102	11.389

Sumber : BPS Kab. Semarang 2017

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang cenderung meningkat di segala bidang tiap tahunnya. Hal ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dari tahun ke tahun yang akan datang.

C. Peran Pendidikan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Semarang cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama.

Bila dilihat perannya pendidikan mempunyai sumbangan yang berarti dalam konteks pembangunan daerah terutama dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berkahlak mulia. Mulai sejak anak usia dini hingga usia dewasa yaitu sejak usia TK, SD, SMP, SMA hingga usia dewasa, khusus untuk usia sekolah digarap lewat pendidikan formal. Sedangkan tiga tahun diatas usia sekolah merupakan garapan pendidikan non formal.

Kualitas sumber daya manusia yang tersedia bagi penyelenggara birokrasi pemerintahan sangatlah terbatas. Demikian juga keberadaan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Semarang. Sangat terbatas secara kualitas namun terasa berlebihan secara kuantitas. Padahal untuk membangun organisasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien, selain unsur kelembagaan unsur sumber daya manusia sebagai penyelenggara organisasi harus mencukupi.

Untuk memicu gairah para pelaksana birokrasi pemerintah maka mendorong para pelaksana tersebut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dengan jalan melanjutkan sekolah, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan lain-lain. Dengan kemampuan pelaksana birokrasi yang optimal diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menumbuhkan kreatifitas dan pembangunan yang selalu berorientasi pada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

D. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penyusunan RAD PUS tahun 2019-2021 ini berasal dari berbagai Institusi. Institusi dan jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Tabel I.9
Institusi dan Jenis Data yang di Kumpulkan

No	Jenis Data	Institusi	Keterangan
1	Situasi dan Kondisi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda ▪ BPS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Profil Daerah ▪ RKPD Kabupaten Semarang
2	Gambaran Umum Pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian IKU, IKK, IKPD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ▪ APBD tahun 2016/2017

No	Jenis Data	Institusi	Keterangan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ▪ BPS ▪ Barenlitbangda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Sensus Sekolah tahunan ▪ Laporan Keuangan Pemerintah ▪ RKPD ▪ RPJMD
4	Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ▪ Kantor Kemenag ▪ Barenlitbangda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Sensus Sekolah Tahunan ▪ Laporan Keuangan Pemerintah ▪ RKPD ▪ RPJMD
5	Pendidikan Keaksaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan ▪ BPS ▪ Barenlitbangda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Sensus Sekolah Tahunan ▪ Sensus Penduduk ▪ Survei melek huruf ▪ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ▪ RKPD ▪ RPJMD
6	Pendidikan Kecakapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ▪ Disnaker ▪ Barenlitbangda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Sensus Sekolah Tahunan ▪ LKPJ Disnaker ▪ RKPD ▪ RPJMD
7	Pendidikan Holistik Berbasis Karakter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ▪ Kesbangpol ▪ Barenlitbangda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ RKPD ▪ RPJMD

No	Jenis Data	Institusi	Keterangan
8	Mutu Tenaga Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Sensus Sekolah Tahunan ▪ Sensus Penduduk ▪ LKPJ Disdikbudpora ▪ Dokumen penelitian/ hasil survai ▪ RKPD ▪ RPJMD
9	Belanja Publik Untuk Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda ▪ Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab. Semarang Dalam Angka ▪ Sensus Sekolah Tahunan ▪ Sensus Penduduk ▪ LKPJ Disdikbudpora ▪ RKPD ▪ RPJMD

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

A. Capaian Pembangunan Pendidikan

1. Perluasan dan Pemerataan Pelayanan Akses Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan diukur melalui capaian hasil (*outcomes*) berdasarkan pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan pada tahun-tahun pelajaran. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APK PAUD Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan APK PAUD Kabupaten Semarang
Tahun 2012 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	PAUD						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di PAUD	37.575	33.513	40.039	40.638	40.681	39.824
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	47.953	49.827	50.770	51.375	51.687	50.799
1.3	APK PAUD	37,13	44,90	47,18	54,92	64,28	64,85

Sumber: Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah PAUD di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan jumlah siswa yang bersekolah PAUD sebanyak 857 orang jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang bersekolah PAUD pada tahun 2016.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan APK Jenjang Sekolah Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	98.698	97.277	97.252	97.818	98.202	99.118
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	93.989	93.099	92.618	93.600	91.728	93.181
1.3	APK SD/MI/Paket A	105,01	105,02	105,00	104,51	107,06	106,37

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang bersekolah SD di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan APK jumlah siswa yang bersekolah SD jika dibandingkan dengan APK tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah SD/ sederajat. Dari hasil pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (usia 7-21 tahun) pada tahun 2017 diperoleh data sebanyak 1.190 orang anak tidak melanjutkan kembali sekolahnya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya Faktor Internal (kurangnya kemauan pribadi anak, sudah bekerja, sudah menikah, kesehatan kurang) dan Faktor Eksternal (jauhnya jarak dan kondisi geografis, lingkungan tidak mendukung, kurang mampu secara ekonomi).

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data

perkembangan APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Perkembangan APK Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMP/MTs/Paket B						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	42.811	43.382	43.709	44.072	43.510	43.392
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	44.649	45.213	45.531	45.776	44.610	42.417
1.3	APK SMP/MTs/Paket B	95,88	95,95	96,00	96,28	97,53	102,3

Sumber: Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang bersekolah SMP di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase, dengan nilai ideal 100%. Makin tinggi nilai APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan APM di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkembangan APM Kabupaten Semarang
Tahun 2012 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A						
1.2	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	68.548	72.294	69.808	69.796	67.399	67.449
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	84.260	90.584	90.394	91.644	92.483	93.181
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,05	95,09	95,15	95,16	95,18	93,02
2	SMP/MTs/Paket B						
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	31.488	28.594	28.202	28.549	25.825	25.078
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	42.154	42.899	42.950	43.772	43.372	42.417
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,70	81,75	81,80	81,81	81,85	75,02

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah APM siswa yang bersekolah baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 mengalami penurunan APM baik di jenjang SD maupun SMP. Hal ini menunjukkan bahwa untuk APM belum mencapai apa yang telah

ditargetkan dikarenakan adanya preferensi untuk melanjutkan pendidikan ke daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Disamping itu pada tahun 2017 terjadi perubahan metode perhitungan APM yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun-tahun sebelumnya penghitungan APM dilakukan menggunakan Laporan Individu Sekolah dengan teknik pembulatan ke atas untuk usia 6 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan untuk SD dan usia 12 tahun 6 bulan sampai dengan 12 tahun 11 bulan untuk SMP, sehingga jumlah siswa untuk pembilang lebih banyak. Mulai tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan metode perhitungan APM yang baru dimana penghitungan APM dilakukan dengan menggunakan data dapodik yang tidak menerapkan sistem pembulatan usia siswa.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Semarang dapat dilihat dari data perkembangan APM di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 – 12 th)	100	100	99,21	100	100
SMP/ MTs (13 – 15 th)	95,08	96,89	97,58	95,65	95,65
SMA/SMK/MA (16-18 th)	56,10	61,34	59,72	71,09	73,34

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang tersaji pada Tabel 2.5 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang selalu tercapai 100% tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang untuk dapat bersekolah SD/MI adalah sebesar 100%. Adapun capaian APS penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Semarang rata-rata mencapai lebih dari 95%, yang bermakna bahwa peluang penduduk Kabupaten Semarang usia 13-15 tahun untuk dapat bersekolah jenjang SMP/MTs adalah sebesar 95%.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Hasil peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur berdasarkan beberapa indikator. Pada RAD ini dibahas beberapa indikator, selain indikator mutu guru (akan dibahas pada bab VIII), yaitu :

2.1. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas disuatu wilayah untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dengan demikian indikator RLS dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata tingkat pendidikan riil masyarakat dalam suatu wilayah. Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah; b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; c. Ijasah tertinggi yang dimiliki, dan d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2017, Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Semarang disajikan dalam Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6
Rata-rata lama Sekolah Kabupaten Semarang
Tahun 2012 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Rata-rata lama sekolah	7,24	7,28	7,31	7,33	7,48	7,87

Sumber :BPS Kabupaten Semarang, 2017

2.2. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2012-2017 dapat disajikan sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Semarang
Tahun 2012 – 2017

No	Satuan pendidikan	Persentase (%)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,04
2.	SMP/MTs	0,51	0,51	0,41	0,20	0,17	0,52

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data pada Tabel 2.7 di atas, dapat diketahui bahwa Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI di Kabupaten Semarang mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 0,04% pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya program pemberian beasiswa untuk siswa miskin/tidak mampu dari APBD Kabupaten dan APBN melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta program pemberian BOS untuk semua siswa.

Akan tetapi untuk jenjang SMP angka putus sekolah sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan, namun di tahun 2017 justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat Jumlah siswa putus sekolah jenjang SMP/MTs di Kabupaten Semarang sebanyak 221 anak. Penyebab putus sekolah

tersebut bukan dikarenakan faktor ekonomi, namun karena tingkat kenakalan remaja yang semakin meningkat akibat kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Selain itu meningkatnya angka putus sekolah pada jenjang SMP diakibatkan perilaku pergaulan bebas dikalangan anak usia SMP yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

2.3. Angka Kelulusan

Capaian angka kelulusan merupakan salah satu indikator penentu daya saing kualitas bidang pendidikan. Angka Kelulusan pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Semarang pada tahun 2011-2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Kelulusan Tiap Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI							
1.2	Jumlah Lulusan SD/MI	14.854	15.501	15.593	15.606	15.317	15.218	15.133
1.2	Jumlah siswa kelas VI tahun n-1	14.854	15.501	15.593	15.606	15.317	15.218	15.133
1.3	Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	SMP/MTs							
2.1	Jumlah Lulusan SMP/MTs	12.650	12.562	12.489	12.783	13.455	13.563	13.727
2.2	Jumlah siswa kelas IX tahun n-1	12.775	12.678	12.500	12.784	13.455	13.563	13.727
2.3	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,02	99,09	99,91	99,99	100,00	100,00	100,00
3	SMA/SMK/MA							
3.1	Jumlah Lulusan SMA/SMK/MA	6.479	6.660	7.305	7.816	8.058	8.486	Prov
3.2	Jumlah siswa kelas XII tahun n-1	6.492	6.671	7.307	7.819	8.058	8.486	Prov
3.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,80	99,83	99,97	99,96	100,00	100,00	Prov

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Capaian Angka Kelulusan tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Semarang menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata tingkat kelulusan mencapai 100% baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pendidikan sangat tinggi, serta didukung adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, pihak Sekolah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Orang Tua Murid/Siswa (Komite).

2.4. Nilai Ujian Nasional (UN)

Nilai Ujian Nasional ini selain sebagai salah satu indikator kelulusan siswa, juga sebagai satu-satunya penentu kompetisi masuk sekolah negeri di jenjang berikutnya, kecuali untuk tingkat universitas yang memiliki sistem penerimaan tersendiri yaitu SNM-PTN. Nilai rata-rata Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Nilai Rata-rata Ujian Nasional
Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	60,89	70,35	60,49	60,72	67,97	75,53	75,70
2	SMP/MTs	60,78	60,91	60,48	60,62	55,10	54,19	54,09
3	SMA/SMK/MA	70,13	70,17	70,35	60,94	52,10	51,60	Prov

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

2.5. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I (SB I) pada jenjang yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan jenjang yang lebih rendah (L) tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase. Kegunaan AM adalah

untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melihat daya tampung dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Resume capaian Angka Melanjutkan tiap-tiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Angka Melanjutkan
Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI ke SMP/MTs	93,33	93,30	92,53	91,66	94,16	93,66	92,88
2	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	70,42	76,26	74,88	75,11	82,61	84,08	85,05

Sumber : Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang disajikan pada Tabel 2.10 di atas, dapat diketahui bahwa Angka Melanjutkan untuk SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 dan cenderung menurun lagi pada tahun 2016 dan 2017. Capaian Angka Melanjutkan ini tidak memenuhi target RPJMD dikarenakan siswa terutama yang berada didaerah perbatasan lebih memilih bersekolah di luar daerah Kabupaten Semarang khususnya sekolah-sekolah berbasis keagamaan (pondok pesantren).

Angka Melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA pada tahun 2017 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun mulai tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan dan memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang akan pentingnya pendidikan semakin meningkat.

2.6. Prosentase Ruang Kelas Sesuai SNP

Sebagaimana ketentuan yang diatur pada Permendikbud Nomor 28 tahun 2016, Mutu Pendidikan merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prosentase ruang kelas sesuai SNP merupakan jumlah ruang kelas sesuai SNP dibagi jumlah seluruh ruang kelas dikalikan 100%. Prosentase ruang kelas sesuai SNP ini merupakan salah satu indikator mutu pendidikan. Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang telah berhasil mendukung tercapainya ruang kelas yang sesuai standar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Ruang Kelas Sesuai SNP
Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	62,80	95,24	95,57	91,18	92,00	96,24	92,17
2	SMP/MTs	79,20	83,53	86,60	97,41	97,44	98,34	94,97

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kriteria minimal, berarti bahwa semua satuan pendidikan minimal harus memenuhi SNP. Salah satu kunci sukses meningkatnya capaian SPM Bidang Dikdas adalah karena didorong adanya upaya pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar yang direalisasikan melalui : Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah melalui pembangunan dan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas/bangunan sekolah serta pemenuhan sarana pendukung proses pembelajaran.

Dilihat dari data pada Tabel 2.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang telah berhasil

mendukung tercapainya ruang kelas yang sesuai standar. Namun demikian, jumlah ruang kelas baik untuk jenjang SD dan SMP pada tahun 2017 terlihat menurun dikarenakan hasil perhitungan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang SD maupun jenjang SMP belum mencakup hasil pendataan hingga bulan Desember/akhir tahun 2017 akibat pemberlakuan mekanisme *cutt off* pendataan Dapodik yang oleh Kemendikbud ditetapkan pada bulan November.

Adanya mekanisme *cut off* ini berakibat belum masuknya hasil pendataan rehab ruang kelas SD sebanyak 91 (sembilan puluh satu) unit dan ruang kelas SMP sebanyak 16 unit yang baru selesai dilaksanakan pada akhir Bulan Desember 2017.

2.7. Hasil Akreditasi

Upaya peningkatan mutu juga ditempuh melalui akreditasi sekolah dan madrasah. Dengan mempertimbangkan bahwa akreditasi dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, maka ke depan semua satuan pendidikan diupayakan untuk melaksanakan akreditasi secara berkelanjutan. Menurut Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) idealnya minimal 40% di semua jenjang pendidikan nilai akreditasinya A dan maksimal 60% memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan berakreditasi minimal B. Adapun hasil peringkat akreditasi Kabupaten Semarang periode tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Peringkat Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah
di Kabupaten Semarang Tahun 2011-2017

No	Jenjang	Jumlah dan Persentase Peringkat Akreditasi								TOTAL
		A		B		C		TT		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
1	TK/RA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	1	-	4	-	-	-	-	-	5
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	2014	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	2015	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017	1	-	8	-	1	-	-	-	10

No	Jenjang	Jumlah dan Persentase Peringkat Akreditasi								TOTAL
		A		B		C		TT		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
2	SD/MI									
	2011	296	46,61	319	50,24	20	3,15	0	-	635
	2012	302	46,53	328	50,54	19	2,93	0	-	649
	2013	304	46,13	337	51,14	18	2,73	0	-	659
	2014	322	48,57	324	48,87	17	2,56	0	-	663
	2015	349	52,72	299	45,17	14	2,11	0	-	662
	2016	441	66,52	222	33,48	0	-	0	-	663
	2017	463	69,73	200	30,12	1	0,15	0	-	664
3	SMP/MTs									
	2011	58	46,40	53	42,40	11	8,80	3	2,40	125
	2012	59	45,74	63	48,84	6	4,65	1	0,78	129
	2013	60	46,15	63	48,46	6	4,62	1	0,77	130
	2014	62	46,62	64	48,12	6	4,51	1	0,75	133
	2015	64	47,76	64	47,76	5	3,73	1	0,75	134
	2016	74	55,22	55	41,04	4	2,99	1	0,75	134
	2017	75	55,15	57	41,91	3	2,21	1	0,74	136
4	SMA/MA									
	2011	14	43,75	15	46,88	2	6,25	1	3,13	32
	2012	15	46,88	14	43,75	2	6,25	1	3,13	32
	2013	15	46,88	15	46,88	1	3,13	1	3,13	32
	2014	16	50,00	12	37,50	3	9,38	1	3,13	32
	2015	17	53,13	11	34,38	3	9,38	1	3,13	32
	2016	17	51,52	14	42,42	1	3,03	1	3,03	33
	2017	17	48,57	16	45,71	1	2,86	1	2,86	35
5	SMK									
	2011	10	18,52	42	77,78	2	3,70	0	-	54
	2012	11	19,64	45	80,36	2	3,57	0	-	56
	2013	12	19,35	48	77,42	2	3,23	0	-	62
	2014	13	19,70	52	78,79	1	1,52	0	-	66
	2015	13	18,84	52	75,36	4	5,80	0	-	69
	2016	13	18,31	53	74,65	5	7,04	0	-	71
	2017	30	32,61	55	59,78	7	7,61	0	-	92
6	SLB									
	2011	0	-	1	20,00	4	80,00	0	-	5
	2012	0	-	1	20,00	4	80,00	0	-	5
	2013	0	-	1	20,00	4	80,00	0	-	5
	2014	0	-	1	20,00	4	80,00	0	-	5
	2015	0	-	2	20,00	3	80,00	0	-	5
	2016	0	-	3	20,00	2	80,00	0	-	5
	2017	0	-	3	20,00	2	80,00	0	-	5

Sumber: Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa hasil perolehan nilai akreditasi di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2017, untuk semua jenjang belum mencapai kondisi ideal sesuai BAN-SM, yaitu masing-masing jenjang minimal 40% berakreditasi A dan

Maksimal 60% berakreditasi B. Hasil perolehan nilai akreditasi di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2017, pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA telah memenuhi kondisi ideal dimana rata-rata akreditasi telah mencapai lebih dari 40%. Namun pada jenjang SMK dan SLB belum memenuhi target minimal. Capaian ini didukung dengan adanya pengalokasian dana untuk visitasi dan terdananya tim akreditasi sekolah jenjang SD dan SMP Kabupaten Semarang dari dana APBD Kabupaten Semarang.

B. Kebijakan dan Kerangka Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Pembangunan pendidikan dilakukan dengan arah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai investasi yang berkelanjutan. Dilakukan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kebijakan pembangunan bidang pendidikan dilakukan dengan memperhatikan sinergitas kebijakan, baik Pusat, regional maupun daerah.

Dilaksanakan dalam suatu mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengawasan (evaluasi). Perencanaan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara sinergis, yakni RPJP, RPJM/Renstra OPD terkait, dan Rencana Kerja Tahunan.

Struktur dan Organisasi Sistem Pendidikan Daerah

Sebagaimana ketentuan dalam Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dilakukan melalui jenjang dan jalur pendidikan. Jenjang Pendidikan dilakukan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs), Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA). Jalur pendidikan dilakukan melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pendidikan Dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs, yang sesuai dengan kebijakannya wajib diikuti oleh seluruh penduduk kelompok umur yang sesuai (umur 7 s/d 15 tahun), yakni melalui kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun.

Dinas Pendidikan ,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, terdiri dari satu bagian dan lima bidang dan Kelompok Fungsional. Adapun Bagian dan Bidang meliputi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bag Perencanaan
 - b. Sub Bag Keuangan
 - c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terbagi menjadi 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Pendidik Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pendidik Masyarakat
 - c. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - c. Seksi Sarana dan Prsarana DIKDAS
4. Bidang Pembinaan Pembinaan PTK
 - a. Seksi PTK PAUD dan Dikdas
 - b. seksi PTK SD
 - c. Seksi PTK SMP
5. Bidang Kebudayaan , terdiri dari :
 - a.. Seksi Kesejarahan,Permusiuman dan Kepurbakalaan
 - b. Seksi Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya
6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga , terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan
 - b. Seksi Olah Raga
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga

D. Pembiayaan Pendidikan : Pola dan Tren (APBN dan APBD)

Pembangunan pendidikan merupakan tanggung bersama, Pemerintah dan Masyarakat. Dengan demikian pembiayaan pendidikan dilakukan melalui sinergitas pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), dengan tetap mengembangkan pola partisipasi masyarakat. Pola partisipasi

masyarakat tersebut tetap dikembangkan dalam kerangka pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat.

Kontribusi Orang Tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diwujudkan dalam bentuk iuran-iuran pendidikan ataupun dukungan bagi peningkatan sarana prasarana pendidikan. Namun demikian, dalam upaya wajib belajar, utamanya bagi masyarakat tidak mampu, maka pemerintah memberikan dukungan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kontribusi masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang dikenal luas adalah pemberian bantuan langsung, baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh pemberian bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi oleh Baznas, CSR Perusahaan, dan sebagainya.

Sedangkan kontribusi pembiayaan pembangunan bidang pendidikan oleh pemerintah dilaksanakan dengan mendasarkan pada UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bidang pendidikan sebesar 20%.

Pola pembiayaan anggaran pendidikan dilakukan secara sinergis, baik antara Pemerintah Pusat (DAU dan DAK) dan Provinsi (APBD). Demikian pula pemerintah provinsi mengalokasikan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Rincian anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana APBD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Rincian anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana APBD tahun 2018

No.	Jenis Anggaran	Tidak Langsung	Langsung			Jumlah
			Personnel	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaji dan Tunjangan	552.144.803.000				
2	Tambahan Penghasilan PNS	8.483.540.000				560.628.343.000

No.	Jenis Anggaran	Tidak Langsung	Langsung			Jumlah
			Personnel	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		66.948.000	1.166.333.000	12.854.000	1.246.135.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	70.700.000	-	70.700.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	16.681.000	-	16.681.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3.879.000	10.573.000	-	14.452.000
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini		900.000	473.596.000	6.150.000	480.646.000
8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			1.052.176.000		1.052.176.000
9	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		700.000	427.749.000	-	428.449.000
10	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		12.118.635.000	58.782.722.000	24.353.726.000	95.255.083.000
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		1.200.000	914.335.000	-	915.535.000
15	Program Pendidikan Non Formal			352.205.000	2.972.397.000	3.324.602.000
17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			858.602.000	-	858.602.000
19	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		27.379.600.000	2.636.826.000	50.000.000	30.066.426.000
	Belanja Tidak Langsung	560.628.343.000				
	Belanja Langsung		39.603.832.000	72.367.282.000	27.735.194.000	
	Jumlah Total					139.706.308.000
						700.334.651.000

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2018

E. Keterkaitan Tujuan PPSH dengan RAD PUS tahun 2018-2021

1. Data yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, adalah data tahun ajaran, maksudnya data yang di Buku RAD tertulis data tahun 2016 berarti adalah data tahun 2015/2016, data tahun 2017 adalah data tahun ajaran 2016/2017, dan seterusnya.

2. **Tujuan PPSH No.1 yaitu** pada tahun 2030, sedikitnya x% anak perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab III tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. **Tujuan PPSH no. 2 yaitu :** pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab IV tentang Pendidikan Dasar.
4. **Tujuan PPSH no. 3 yaitu :** pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat, dengan mengutamakan anak perempuan dan perempuan serta mereka yang terpinggirkan, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab V tentang Pendidikan Keaksaraan.
5. **Tujuan ke -4 PPSH yaitu :** pada tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi, teknik dan kejuruan, serta kursus dan pelatihan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab VI tentang Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*).
6. **Tujuan ke -5 PPSH yaitu :** pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab VI tentang Pendidikan Karakter.

7. **Tujuan ke -6 PPSH** yaitu pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara professional, termotivasi dan didukung dengan baik, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab VIII tentang Mutu Guru.
8. **Tujuan ke -7 PPSH** yaitu pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6 persen dari *produk domestik bruto* (PDB) atau 15-20 persen dari belanja publik untuk pendidikan, dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan negara yang paling membutuhkan, dalam RAD ini diterjemahkan pada Bab IX tentang Belanja Publik Untuk Pendidikan.

BAB III

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa yang berpotensi menentukan kesejahteraan bangsa di masa mendatang, bahkan juga merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan jamak manusia terjadi sekali dalam seumur hidup, yakni pada usia 3-5 tahun. Untuk itu pendidikan anak perlu dimulai sejak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan.

Namun kenyataannya masih cukup banyak anak usia dini yang belum memperoleh kesempatan mendapatkan layanan pendidikan apapun. Hal ini banyak kita jumpai di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau, masyarakat pantai, pinggiran kota Kecamatan maupun masyarakat pada kantong-kantong kemiskinan di daerah kumuh. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat golongan menengah ke bawah yang berada di pelosok pedesaan tentang pentingnya PAUD.

Masih terbatasnya lembaga-lembaga PAUD, terutama untuk memberikan layanan anak usia dini (sejak lahir sampai 6 tahun). Rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, juga belum memenuhi standar pelayanan. Masih terbatasnya dukungan anggaran pemerintah (APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten) terhadap program PAUD, serta masih minimnya fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana) pada lembaga PAUD di wilayah Kabupaten Semarang, sehingga penanganan layanan PAUD belum bisa dilaksanakan secara terpadu.

B. Analisis Situasi dan Kondisi PAUD

1. Perluasan dan Pemerataan Pelayanan Akses Pendidikan

Kondisi Anak Usia Dini (4-6 tahun) di Kabupaten Semarang tahun 2017 tercatat 45.729 anak. Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani pada lembaga PAUD sebanyak 29.655 anak atau 64.85 % dari seluruh jumlah anak usia dini, artinya belum semua Anak usia Dini terlayani pendidikannya.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

Gambar 3.1

Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun yang Terlayani PAUD Di Kabupaten Semarang

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, pada tahun 2017 ditangani melalui Lembaga PAUD Formal yaitu : TK sebanyak 401 dan RA/BA sebanyak 198, dan melalui PAUD Non Formal seperti Kelompok Bermain (KB) sebanyak 454, Taman Penitipan Anak (TPA) sebanyak 29 dan Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD) sebanyak 19. Data tentang lembaga layanan pendidikan PAUD disajikan pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.1
Data Lembaga Layanan Pendidikan PAUD
Di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017

No	Jenis Lembaga	Jumlah Lembaga					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Taman Kanak-kanak (TK)	357	366	370	382	392	401
2	Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA)	190	194	197	201	198	198
3	Kelompok Bermain (KB)	-	-	-	-	-	454
4	Taman Penitipan Anak (TPA)	-	-	-	-	-	29
5	Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD)	-	-	-	-	-	19

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

Fakta tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Semarang guna mengupayakan pemerataan dan perluasan akses PAUD secara bertahap, baik penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pengembangan mutunya. Oleh karena itu dalam penanganan PAUD harus dilakukan dengan benar dan menyenangkan serta secara holistic dan terintegrasi guna mempersiapkan generasi yang produktif, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi keluarga, orang tua dan masyarakat secara luas.

Upaya Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan :

- a. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
- b. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini;
- c. Pemberian dana bantuan rintisan program PAUD (TPA, KB, Pos PAUD);
- d. Bantuan kelembagaan yang sudah berjalan;
- e. Lomba PAUD;
- f. Pemilihan lembaga PAUD berprestasi tingkat Kabupaten;
- g. Program Peningkatan PAUD Holistik Integratif.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi dan Daya Saing

Hasil penelitian menyatakan bahwa siswa dapat menyelesaikan pembelajaran yang lebih efektif di dalam kelas yang lebih kecil, hal tersebut akan berbanding terbalik ketika jumlah siswa dalam satu kelas meningkat dan melebihi yang seharusnya. Demikian juga, guru akan lebih efektif menangani siswa dalam kelas yang kecil dibanding ketika dalam satu kelas dengan siswa melebihi yang seharusnya. Untuk mengetahui perbandingan guru terhadap siswa yang diampu, maka digunakan rasio guru murid. Rasio guru dan Murid PAUD di Kabupaten Semarang tahun 2012-2017 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Rasio Guru dan Murid PAUD
Di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2106	2017
1	PAUD 4-6 th						
1.1.	Jumlah Guru	1.759	1.866	1.879	1.920	1.946	1.731
1.2.	Jumlah Murid	25.191	26.679	27.338	28.084	29.020	26.890
1.3.	Rasio	1:14,3	1:14,29	1:14,5	1:14,6	1:14,90	1:15,5

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

Data Tenaga Pendidik PAUD pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rasio antara Pendidik PAUD dengan peserta didik untuk usia 4-6 tahun berbanding 1 : 15,5. Artinya bahwa 1 (satu) orang guru PAUD rata-rata mengampu 15 – 16 orang anak di dalam kelasnya.

Presentase tenaga pendidik PAUD terlatih dari tahun ke tahun meningkat, dengan rasio sebesar 80 % pada tahun 2015, 83,56% pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi sebesar 91,87%. Secara lengkap perkembangan prosentase pendidik PAUD terlatih di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perkembangan prosentase pendidik PAUD terlatih
Tahun 2012-2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.	Jumlah Guru terlatih	NA	NA	NA	6984	7300	5548
1.2.	Jumlah guru	NA	NA	NA	8730	8736	6039
1.3.	Rasio	NA	NA	NA	80%	83,56%	91,87%

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Latar belakang pendidikan dan kualifikasi pendidikan berpengaruh terhadap penguasaan pengajaran para guru. Oleh karena itu kualifikasi guru menjadi salah satu indikator dalam penentuan mutu pendidikan. Secara lengkap data persentase guru yang memenuhi kualifikasi di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi
Di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PAUD						
1.2	Guru berkualifikasi S1/D-IV PAUD	-	-	6404	6984	1300	1.521
1.2	Jumlah Guru PAUD	-	-	8676	8730	1946	1.998
1.3	Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV PAUD	52.67	65.14	73.76	80.00	66.80	76.13

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Dari data yang disajikan pada Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah guru PAUD sebanyak 1.946 orang dan yang memenuhi kualifikasi sebesar 1.300 orang. Berarti sebesar 66,80% guru PAUD memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV. Angka

ini meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 76,13%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi naik dari tahun ke tahun. Walaupun belum mencapai 100%, namun kondisi ini menunjukkan bahwa bahwa kualitas pendidik PAUD di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun Data Pendidik/Guru/Kader Pendidikan PAUD di Kabupaten Semarang pada tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Data Pendidik/ Guru/ Kader Pendidikan PAUD
Di Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No	Jenis Lembaga	Jumlah Guru					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1159	1229	1247	1291	1308	1024
2	Raidatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA)	600	637	632	643	638	625
3	Kelompok Bermain (KB)	-					267
4	Taman Penitipan Anak (TPA)	-					55
5	Satuan PAUD Sejenis (POS PAUD)	-					27

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

Salah satu indikator mutu pendidikan di jenjang PAUD dapat diukur dengan penetapan standar dan akreditasi sekolah. Kapasitas akreditasi sekolah diperluas dengan berdirinya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANS/M) tingkat Nasional dan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) serta Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) tingkat Kabupaten. Pada jenjang PAUD khususnya TK/RA di Kabupaten Semarang, masih sangat minim jumlah dan persentase sekolah yang terakreditasi di tahun 2011 - 2017. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Jumlah dan Presentase Peringkat Akreditasi TK/RA
di Kabupaten Semarang Tahun 2011-2017

No	Jenjang	Jumlah dan Persentase Peringkat Akreditasi								TOTAL
		A		B		C		TT		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
1	TK/RA									
	2011	1		4						5
	2012									
	2013	1								1
	2014	1								1
	2015	1								1
	2016									
	2017	1		8		1				10

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kabupaten Semarang, 2017

Upaya Peningkatan Mutu :

- Pengembangan kurikulum, bahan ajar, model-model pembelajaran, dan penilaian;
- Pelatihan dan magang bagi pendidikan dan pengelola program PAUD;
- Dukungan Alat Permainan Edukatif (APE);
- Pengembangan pusat rujukan PAUD (*Center of Excellence*) melalui kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi;
- Pengembangan lembaga-lembaga PAUD tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

- a. Lembaga PAUD yang memiliki tata kelola dan pencitraan publik melalui akreditasi yang dikategorikan A (Amat Baik), khususnya PAUD Formal baru mencapai 5 lembaga dan yang akreditasi B mencapai 12 lembaga. Masih ada lembaga PAUD yang terakreditasi C dan Tidak Terakreditasi/TT. Berarti masih cukup banyak lembaga PAUD yang perlu ditingkatkan mutunya;

- b. Penyusunan dan penyempurnaan Pedoman/Acuan Teknis program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Sosialisasi terhadap berbagai kebijakan termasuk pemberian bantuan dana sebagai stimulan terhadap Lembaga-lembaga PAUD agar diketahui masyarakat luas;
- d. Penyusunan Profil (Direktori) Lembaga PAUD Non Formal (TPA, Kelompok Bermain dan SPS/ POS PAUD);
- e. Koodinasi dan kerjasama dengan Lembaga program PAUD;
- f. Sosialisasi Pentingnya PAUD;
- g. Sosialisasi Kurikulum dan Akreditasi PAUD.

C. Rencana Aksi Daerah (RAD)

1. Kebijakan PAUD

- a. Meningkatkan pemerataan akses dan perluasan PAUD secara terpadu dan terintegrasi;
- b. Meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan bagi anak Usia Dini;
- c. Meningkatkan *good governance* dan akuntabilitas di bidang layanan pendidikan bagi anak usia dini.

2. Strategi pelaksanaan

- a. Meningkatkan kualitas aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang pendidikan;
- b. Memantapkan komitmen dan sinergitas melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Desa/Kelurahan;
- c. Membangun kemitraan dan kerja sama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya saing pendidikan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Program/Kegiatan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Pendidikan Non Formal;
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan;
- d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

4. Sasaran/Target

- a. Peningkatan APK PAUD;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana lembaga PAUD yang memenuhi standar nasional pendidikan;
- c. Peningkatan jumlah tenaga pendidik PAUD dengan ratio terhadap peserta didik yang signifikan;
- d. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik, dengan sasaran :
 - Anak usia 0 – 6 tahun
 - Lembaga PAUD Formal & Non Formal
 - Orang tua/Keluarga
 - Pendidik dan Pengelola PAUD
 - Tokoh masyarakat.

5. Target Prioritas dan Proyeksi Periode Tahun 2018-2021

Tabel 3.7
Target Prioritas & Proyeksi Kabupaten Semarang
Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1.	APK PAUD/TK (4-6 th) Tahun 2017 = 64,85	67.40	69.40	72.05	72.10
2.	Ruang Kelas kondisi baik PAUD/TK mendukung PBM Tahun 2017 = 93,19	86.64	86.67	86.70	87.00
3.	% Lembaga TK/RA yang terakreditasi minimal B Tahun 2017 = 1,33% (8 lembaga)	2	3	4	5

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
4.	Ratio Jumlah Pendidik dengan Peserta Didik Tahun 2017 = 15,5	15	14,8	14,5	14,2
5.	Guru berkualifikasi S1/D-IV PAUD Tahun 2017 = 76,13%	78	80	82	85

BAB IV

PENDIDIKAN DASAR

A. Pendahuluan

Target Deklarasi Incheon Korsel 2015 : Pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan.

Target Nasional : Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) PUS sampai dengan saat ini belum tersusun. Dengan demikian diasumsikan, target capaian program pembangunan pendidikan dasar yang akan dicapai secara nasional mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Incheon Korsel 2015.

Target Provinsi Jawa Tengah : Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi pelaksanaan Program PUS, memiliki kewajiban untuk mewujudkan Deklarasi Incheon Korsel 2015. Namun demikian, sampai dengan saat ini Provinsi Jawa Tengah belum merumuskan target capaian yang akan diwujudkan dalam program pembangunan pendidikan dasar, khususnya sampai kurun waktu tahun 2030, karena RAN PUS sebagai acuan Provinsi belum tersusun.

Target Kabupaten Semarang : Kabupaten Semarang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah harus ikut andil untuk menyukseskan program dimaksud. Namun juga disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Semarang paling tidak dapat terselenggaranya pendidikan dasar kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2021, sesuai dengan tahun perencanaan RPJMD secara maksimal. Sesuai dengan indikator yang ada di RPJMD, maka penentuan target capaian pada akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2021, terkait Pendidikan dasar dirumuskan sebagai berikut:

1. APM jenjang SD/MI/Paket A = 100 %
2. APK jenjang SD/MI/Paket A = 100 %
3. APM jenjang SLTP/MTs/Paket B = 81,95 %

4. APK jenjang SLTP /MTs/Paket B = 96,34 %
5. Angka Putus Sekolah SD/MI = 0,07 %
6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs = 0,17 %
7. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs = 94,30 %
8. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK = 82,72 %
9. Ruang kelas kondisi baik SD mendukung PBM = 94,50 %
10. Ruang kelas kondisi baik SMP mendukung PBM = 98,50 %
11. Komite SD berperan aktif = 100 %
12. Komite SMP berperan aktif = 100 %
13. Siswa miskin SD/MI memperoleh beasiswa = 97,20 %
14. Siswa miskin SMP/MTs memperoleh beasiswa = 96,70 %
15. Penerapan TIK pembelajaran SD = 46,52 %
16. Penerapan TIK pembelajaran SMP = 77,45 %
17. Angka Kelulusan SD/MI = 100 %
18. Angka Kelulusan SMP/MTs = 99,99 %
19. Guru SD/MI memenuhi kualifikasi S1/DIV = 85,30 %
20. Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/DIV = 94,50 %
21. Guru SD bersertifikat pendidik = 61,75 %
22. Guru SMP bersertifikat pendidik = 66,30 %

B. Analisis Situasi dan Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang

Kondisi demografi usia pendidikan dasar di Kabupaten Semarang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : Jumlah penduduk mencapai 1.027.489 orang yang termasuk klasifikasi usia Pendidikan dasar dalam usia 7-12 tahun sejumlah 93.181 atau 9,07 % dan usia 13-15 tahun sebanyak 42.417 atau 14,13%.

1. Aspek Perluasan dan Pemerataan Pelayanan Akses Pendidikan

Peningkatan perluasan, pemerataan pelayanan akses pendidikan dasar antara lain ditunjukkan oleh beberapa informasi sebagai berikut :

Data SD/MI

Satuan pendidikan SD/MI adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berperan sebagai pondasi pencerdasan anak bangsa di Kabupaten Semarang merupakan prioritas pembangunan pendidikan yang dibangun melalui Program Wajib Belajar. Data pokok Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Pokok SD dan MI Kabupaten Semarang
Tahun 2015 - 2017

No	Komponen	2015			2016			2017		
		SD	MI	Jumlah	SD	MI	Jumlah	SD	MI	Jumlah
1.	Sekolah	511	163	674	509	163	672	504	163	667
2.	Siswa Baru Tk. 1	12.584	3.715	16.299	12.175	3.993	16.168	12.727	4.162	16.889
3.	Siswa	77592	19800	97392	76863	20962	97825	14369	22221	3659
4.	Lulusan	12.494	2.752	15.246	12.281	2.887	15.168	12.273	2.815	15.088
5.	Ruang Kelas									
	a. Baik	2.566	541	3.107	2.591	601	3.192	1.320	612	1.932
	b. Rusak Ringan	557	351	908	658	338	996	1.889	342	2.231
	c. Rusak Berat	199	150	349	127	139	266	129	139	268
6.	Kelas (rombel)	3.395	1.048	4.443	3.376	1.078	4.454	3.474	956	4430
7.	Fasilitas									
	a. Perpustakaan	258	-	258	370	-	370	372	-	372
	b. Lapangan olahraga	353	-	353	402	-	402	505	-	505
	c. UKS	296	-	296	316	-	316	331	-	331
	d. Ruang Komputer	12	-	12	148	-	148	152	-	152

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

Tahun 2015, jumlah SD dan MI sebanyak 674 sekolah dengan ruang kelas sebanyak 4.364 dan jumlah kelas sebanyak 4.443 rombongan belajar. Tahun 2016, jumlah SD dan MI berkurang 2 sekolah dari tahun sebelumnya namun ruang kelas naik menjadi 4.454 ruang kelas dan jumlah

kelas naik menjadi 4.454 rombongan belajar. Tahun 2017 jumlah SD dan MI berkurang menjadi 667, ruang kelas menjadi 4.431 dan jumlah kelas 4.430. Penurunan jumlah sekolah dan jumlah ruang kelas ini disebabkan karena adanya sekolah yang di re-grouping, namun disatu sisi terjadi kenaikan jumlah kelas, dikarenakan adanya penambahan jumlah rombongan belajar khususnya di sekolah-sekolah yang besar.

Ditinjau dari kondisi ruang kelas, pada tahun 2017 terdapat 1.932 ruang dalam kondisi baik, menurun dibanding tahun 2016 sebanyak 3.192, sebanyak 2.231 ruang kelas kondisi rusak ringan (meningkat dari tahun 2016 : 996) dan 268 ruang kelas kondisi rusak berat (meningkat dari tahun 2016 : 266). Adapun kondisi sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran seperti perpustakaan dimiliki oleh 372 (55,77%) SD/MI, lapangan olahraga dimiliki 505 (75,71%) SD/MI, 331 (49,63%) SD/MI telah memiliki UKS, serta 152 (22,79%) SD/MI yang memiliki ruang komputer.

Dilihat dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kelas dan sarana prasarana penunjang secara umum mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017, Jumlah siswa SD/MI sebanyak 36.590 anak, dengan jumlah siswa baru kelas I tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak anak 16.889 atau (46,16%) diproyeksikan dapat menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun. Adapun lulusan tahun pelajaran 2016/2017 sejumlah 15.088 anak.

Indikator Pemerataan

Indikator pemerataan akses dan layanan pendidikan pada satuan pendidikan SD dan MI terukur melalui enam indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio antara siswa/sekolah, rasio siswa/kelas dan rasio siswa/guru, Angka Tingkat pelayanan Sekolah, Kepadatan penduduk dan angka persentase daerah tertinggal. Pada RAD ini disajikan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Semarang untuk jenjang pendidikan dasar dari tahun 2012 s.d. tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Perkembangan APK Jenjang Sekolah Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A						
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	98.698	97.277	97.252	97.818	98.202	99.118
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	93.989	93.099	92.618	93.600	91.728	93.181
1.3	APK SD/MI/Paket A	105.01	105.02	105.00	105.51	107.06	106.37

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM di Kabupaten Semarang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3 ini :

Tabel 4.3
Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A						
1.2	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	89.327	88.528	88.127	89.070	87.307	86.679
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	93.989	93.099	92.618	93.600	91.728	93.184
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,05	95,09	95,15	95,16	95.18	93.02

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS di Kabupaten Semarang selengkapnya disajikan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 - 12 th)	99,8	100	100	99,20	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa APS SD/MI di Kabupaten Semarang pada Tahun 2016 hingga 2017 pada jenjang SD/MI mencapai 100 persen. Berarti bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan SD/MI di Kabupaten Semarang.

4. Rasio Siswa/Guru

Rasio siswa per guru SD/MI merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan". (Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5).

Tabel 4.5
Perkembangan Rasio Siswa/Guru Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	7.000	6.901	6.787	6.796	6.818	6.093
1.2.	Jumlah Murid	89.134	88.132	96.789	97.392	97.825	86.679
1.3.	Rasio	1:14,02	1:14,08	1:14,26	1:14,33	1:14,34	1:14,22

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2017

Kondisi di Kabupaten Semarang, pada tahun 2012 sampai 2017 rata-rata rasio siswa per guru sebesar 14. Berarti bahwa dilihat dari rasio, jumlah guru SD/MI di Kabupaten Semarang sangat mencukupi. Namun kondisi di lapangan, rasio siswa per guru tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ketercukupan guru di SD/MI, karena di jenjang SD setiap kelas diharuskan ada 1 orang guru. Sementara, jumlah murid pada masing-masing kelas/rombongan belajar sangat bervariasi.

Data SMP/Mts

Satuan pendidikan SMP/MTs adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berperan sebagai lanjutan pencerdasan anak bangsa di Kabupaten Semarang, merupakan prioritas pembangunan pendidikan yang dibangun melalui Program Wajib Belajar. Data pokok Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Semarang Tahun 2015 - 2017 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Data Pokok SMP

No.	Komponen	2014/2015		Jumlah	2015/2016		Jumlah	2016/2017		Jumlah
		SMP	MTs		SMP	MTs		SMP	MTs	
1.	Sekolah	94	40	134	96	40	136	96	41	137

No.	Komponen	2014/2015		Jumlah	2015/2016		Jumlah	2016/2017		Jumlah
		SMP	MTs		SMP	MTs		SMP	MTs	
2.	Siswa Baru Tk. 1	11.465	2.806	14.271	11.443	2.909	14.352	11.291	2.888	14.179
3.	Siswa	33.914	8.387	42.301	34.136	8.381	42.517	33.688	8.483	42.171
4.	Lulusan	10.933	2.750	13.683	10.995	2.666	13.661	11.037	2.728	13.765
5.	Ruang Kelas									
	a. Baik	954	251	1.205	982	256	1.238	1.011	262	1.273
	b. Rusak Ringan	121	27	148	107	25	132	117	38	155
	c. Rusak Berat	18	18	36	19	17	36	19	11	12
6.	Kelas (jml rombel)	1.117	293	1.410	1.138	288	1.426	1.151	315	1.466
7.	Fasilitas									
	a. Perpustakaan	89	-	89	86	-	86	88	-	88
	b. Tempat olahraga	42	-	42	44	-	44	97	-	97
	c. UKS	72	-	72	73	-	73	72	-	72
	d. Laboratorium									
	> Lab. IPA	90	-	90	77	-	77	78	-	78
	> Lab. Multimedia	69	-	69	67	-	67	69	-	69
	e. Ruang Komputer	50	-	50	65	-	65	70	-	70

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

Tahun 2015, jumlah SMP/MTs sebanyak 134 sekolah dengan ruang kelas sebanyak 1.389 dan jumlah kelas sebanyak 1.410 rombongan belajar. Tahun 2016, jumlah SMP/MTs meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 136 sekolah, ruang kelas naik menjadi 1.406 ruang kelas dan jumlah kelas naik menjadi 1.426 rombongan belajar. Tahun 2017 jumlah SMP bertambah menjadi 137, ruang kelas menjadi 1.440 dan jumlah kelas 1.466.

Ditinjau dari kondisi ruang kelas, pada tahun 2017 terdapat 1.273 ruang dalam kondisi baik, sedikit meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 1.238, sebanyak 155 ruang kelas kondisi rusak ringan (meningkat dari tahun 2016 : 132) dan 12 ruang kelas kondisi rusak berat (menurun dari tahun 2016 : 36). Adapun kondisi sarana prasarana penunjang

kegiatan pembelajaran seperti perpustakaan dimiliki oleh 88 (64,23%) SMP/MTs, lapangan olahraga dimiliki 97 (70,80%) SMP/MTs, 72 (52,55%) SMP/MTs telah memiliki UKS, serta 70 (51,09%) SMP/MTs yang memiliki ruang komputer.

Dilihat dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kelas dan sarana prasarana penunjang secara umum mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017, Jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 42.171 anak, dengan jumlah siswa baru kelas I tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak anak 14.179 atau (33,62%) diproyeksikan dapat menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Adapun lulusan tahun pelajaran 2016/2017 sejumlah 13.765 anak.

Indikator Pemerataan

Indikator pemerataan pada jenjang SMP/MTs pada RAD PUS 2018-2021 adalah sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan APK jenjang SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Semarang, secara rinci disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7
Perkembangan APK Jenjang Sekolah Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMP/MTs/Paket B	133	134	134	136	137	138
1.	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	40.649	41.716	42.301	42.517	42.171	31.822
1.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	44.649	45.213	45.531	45.776	44.610	42.417
1.	APK SMP/MTs/Paket B	95,88	95,95	96,00	96,28	97.53	102.30

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

Berdasarkan tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dari tahun 2012-2017 menunjukkan trend naik

sampai tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi jumlah siswa yang berusia kurang dari 13 tahun dan lebih dari 15 tahun. Selain itu juga dikarenakan adanya fluktuasi anak usia sekolah SMP/MTs di Kabupaten Semarang yang bersekolah di luar Kabupaten Semarang.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Kabupaten Semarang tahun 2012-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4.8
Perkembangan APM Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMP/MTs/Paket B						
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	36.478	36.962	37.245	37.449	36.504	31.822
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	44.649	45.213	45.531	45.776	44.610	42.417
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,70	81,75	81,80	81,81	81.83	75.02

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 4.9
Perkembangan APS Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ SMP/MTs (13-15 th)	89,12	95,08	96,88	97,57	95,65	95,65

Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2017

Pada jenjang SMP/MTs, APS tahun 2016 sebesar 95,65 dan pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 95,65. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang

berkesempatan mengenyam pendidikan Dasar jenjang SMP/MTs di Kabupaten Semarang.

4. Rasio Guru – Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Berdasarkan ketentuan pada Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 6, bahwa “Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran”. Adapun perkembangan rasio Guru dengan Murid di Kabupaten Semarang pada tahun 2012-2017 dapat dilihat dalam Tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10
Perkembangan Rasio Guru dan Murid
Tahun 2012-2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMP/MTs						
1.1.	Jumlah Guru	2.662	2.675	2.689	2.725	2.796	
1.2.	Jumlah Murid	30.782	36.845	42.301	42.517	42.171	
1.3.	Rasio	1:15,27	1:15,59	1:15,73	1:15,60	1:15,08	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

2. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya saing Pendidikan

Beberapa indikator peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan pada RAD PUS 2018-2020 ini antara lain: (1). Angka Kelulusan; (2). Nilai Rata-rata Ujian Nasional; (3). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4; (4). Angka Mengulang; (5). Angka Putus Sekolah. Masing-masing indikator dapat dilihat pada ulasan di bawah ini:

(1). Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan jumlah lulusan pada suatu jenjang dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang tersebut pada tahun sebelumnya

dikalikan 100%. Angka Kelulusan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 tersaji dalam tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11
Perkembangan Angka Kelulusan
Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.3	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,02	99,09	99,97	99,96	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Semarang, Angka Kelulusan SD pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%. Kondisi sampai dengan 2017, angka kelulusan SD sebesar 100%. Berarti bahwa pada saat ini target RPJMD sudah tercapai dan tugas kita adalah mempertahankan angka kelulusan tersebut. Untuk Jenjang SMP, target RPJMD tahun 2019 adalah 99,99. Tahun 2017 angka kelulusan SMP sebesar 100%. Perlu upaya untuk mempertahankan angka kelulusan tersebut pada tahun 2019.

(2). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

Data perkembangan prosentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi disajikan pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Prosentase Guru yang memenuhi Kualifikasi
Kabupaten Semarang Tahun 2012 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	SD/MI						
2.1	Guru berkualifikasi S1/D-IV PGSD	-	5711	6404	6.984	6.000	5.548
2.2	Jumlah Guru SD	-	8767	8679	8.730	6.818	6.093
2.3	Persentase guru yang memenuhi Kwalifikasi S1/D-IV SD/MI	52,67	65,14	73,76	80,00	90,45	91.06
3	SMP/MTs						
3.1	Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV	-	2.376	2.430	2.463	2.573	2.243
3.2	Jumlah Guru SMP/MTs	-	2.675	2.689	2.725	2.796	2.399

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3	Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	87,04	88,82	90,37	90,39	92,02	93,50

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

(3). Angka Melanjutkan

Data perkembangan Angka Melanjutkan di Kabupaten Semarang dapat disajikan pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13
Perkembangan Angka Melanjutkan
Kabupaten Semarang Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 – 12 th)	91,66	94,16	93,66	92,88

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah raga Kabupaten Semarang 2017

(5). Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan jumlah capaian kinerja APS pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah seluruh APS setiap jenjang sekabupaten dikalikan 100%. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2011-2017 adalah sebagaimana tabel 4.14 di bawah ini :

Tabel 4.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2017

No	Satuan pendidikan	Persentase (%)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,03
2.	SMP/MTs	0,61	0,51	0,51	0,41	0,20	0,17	0,34

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Semarang 2017

3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik digambarkan dengan indikator pencapaian hasil akreditasi sekolah. Salah satu butir yang menjadi penilaian akreditasi adalah Ruang kelas yang sesuai standar nasional pendidikan (SNP). Data ruang kelas yang sesuai SNP jenjang pendidikan Dasar bisa dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini :

Tabel 4.15
Ruang Kelas Sesuai SNP
Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	62,80	95,24	95,57	91,18	92,00	96.24	92,37
2	SMP/MTs	79,20	83,53	86,60	97,41	97,44	98.34	94,05

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 2017

4. Rencana Aksi Daerah (RAD)

1. Kebijakan Pendidikan Dasar

Kendala pelaksanaan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Kabupaten Semarang, yaitu:

- Kurang optimalnya peran masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
- Masih ada anak-anak usia sekolah yang harus membantu orang tua mencari nafkah, sehingga DO atau tidak melanjutkan.
- Adanya anak berkebutuhan khusus/anak berkelainan yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar.
- Kurang optimalnya akses dan keterjangkauan pendidikan dasar di Kabupaten Semarang.
- Masih adanya mutu tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan, manajemen, proses dan prestasi siswa yang perlu peningkatan.

Berdasarkan kondisi dan kendala sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan pendidikan dasar Kabupaten Semarang dapat dirumuskan:

- a. Meningkatkan kesadaran dan keberpihakan unsur terkait untuk mendukung secara penuh pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 tahun, melalui berbagai upaya.
- b. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar secara berkualitas, dengan prioritas pada daerah dan masyarakat miskin, dan daerah pegunungan.
- c. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar, sehingga lulusannya memiliki kompetensi dasar untuk hidup dalam masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- d. Meningkatkan kualitas budaya sekolah dan efisiensi manajemen sekolah, agar semua lembaga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.

2. Strategi Pelaksanaan

Untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut di atas, maka beberapa strategi pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gerakan Wajib Belajar di Kabupaten Semarang dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
- b. Melaksanakan *online* sistem pendataan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan jajaran birokrasi terkait.
- c. Melakukan prioritas program yang secara langsung memiliki pengaruh terhadap peningkatan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 tahun.
- d. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk untuk mendukung program Wajar Dikdas 9 Tahun.
- e. Melakukan upaya khusus secara lebih efektif dan efisien target-target untuk menggarap masyarakat yang tidak terjangkau melalui penyelenggaraan berbagai pendidikan alternatif.

- f. Pemberian kewenangan dan bertanggungjawab kepada sekolah untuk mendukung pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun.

3. Program/Kegiatan

- a. Penambahan ruang kelas sekolah;
- b. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;
- c. Pembangunan perpustakaan sekolah;
- d. Pembangunan arana air bersih dan sanitary;
- e. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;
- f. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- g. Pengadaan meubelair sekolah;
- h. Pengadaan perlengkapan sekolah;
- i. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
- j. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- k. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;
- l. Pelatihan penyusunan kurikulum;
- m. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;
- n. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;
- o. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah (pelatihan sekolah inklusi);
- p. Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
- q. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- r. Pengembangan materi belajar mengajar dengan Metode Pembelajaran dengan TIK;
- s. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar;
- t. Penyediaan beasiswa kurang mampu;
- u. Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi;
- v. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;
- w. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Sasaran/Target

- a. Peningkatan APK Pendidikan Dasar;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;

- c. Pemerataan tenaga pendidik pada Pendidikan Dasar dengan ratio terhadap peserta didik yang signifikan;
- d. Peningkatan mutu Pendidikan Dasar;
- e. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan Dasar.

5. Target Prioritas dan Proyeksi 2018-2021

Sesuai arahan Provinsi Jawa Tengah, Indikator kinerja tujuan PUS/PSH ke-2 terkait Pendidikan Dasar ada 6 yaitu: (1). Angka Kelulusan SD/MI; (2). Angka Kelulusan SMP/MTs; (3). Presentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SNP; (4). Presentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SNP; (5). Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SD/MI/Paket A dan (6). Rasio APK Perempuan/ Laki-laki SMP/MTs/Paket B.

Tabel 4.16
Target Prioritas dan Proyeksi 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelulusan SD/MI (%) Tahun 2017 = 100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%) Tahun 2017 = 100	99.99	99.99	99.99	99.99
3	Ruang Kelas kondisi baik SD/MI mendukung PBM (%) Tahun 2017 = 92,37	94.04	94.06	94.08	94.50
4	Ruang Kelas kondisi baik SMP/MTs mendukung PBM (%) Tahun 2017 = 94,05	98.31	98.32	98.41	98.50
5.	APM SD/MI/Paket A Tahun 2017 = 93,02	95	95	95	95
6.	APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2017 = 75,02	81.86	81.86	81.90	81.95
7.	APK SD/MI/Paket A Tahun 2017 = 106,37	100	100	100	100
8.	APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2017 = 102,3	96.31	96.32	96.33	96.34

BAB V

PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Pendahuluan

Ukuran keberhasilan pendidikan keaksaraan yang paling umum digunakan adalah angka melek huruf, yang merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka Melek Huruf yang tinggi merupakan langkah awal yang baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Semakin baik sumber daya manusianya, maka penguasaan terhadap ekonomi/kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

Banyak hal yang mempengaruhi mengapa timbulnya sebagian masyarakat yang buta huruf, diantaranya :

- a. Ada anak yang putus sekolah dasar kelas I, II dan III sehingga menjadi buta huruf;
- b. Masih ada warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah terutama dikarenakan faktor ekonomi;
- c. Adanya sebagian masyarakat yang buta huruf kembali dikarenakan kurang intensif dalam pemeliharaan keaksaraannya;
- d. Adanya anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengakses pendidikan;
- e. Penduduk usia tua yang dari dulu sudah buta huruf dan sampai saat ini tidak memungkinkan lagi untuk belajar membaca.

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat buta huruf, adalah : (1) ketidakpahaman tentang pentingnya pendidikan untuk kemajuan kehidupan (baik dibidang kesehatan, HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan lain-lain) dan (2) penyelenggara program keaksaraan kesulitan untuk menarik perhatian dan melibatkan penyandang buta huruf untuk mengikuti program keaksaraan.

Melek huruf adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia. Namun sejak tahun 2014, BPS mengganti indikator tersebut dengan Harapan Lama Sekolah, karena dipandang Angka Melek Huruf sudah tinggi. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Indikator Untuk mengukur pembangunan manusia di bidang pendidikan selain Angka Melek huruf (metode lama), Angka Harapan Lama Sekolah (metode baru), adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.

B. Analisis Situasi dan Kondisi Pendidikan Keaksaraan

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 bahwa penduduk Kabupaten Semarang berusia 15 tahun ke atas yang masih menyandang buta huruf adalah sekitar 4,67 persen, dimana 2,58 persen berjenis kelamin laki-laki dan 6,66 persen perempuan. Dimana pada tahun 2017 mengalami kenaikan angka buta huruf menjadi sebesar 6,09 persen. Data terakhir yang dimiliki BPS mengenai perkembangan angka buta huruf menurut jenis kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2017 secara lengkap dapat disajikan sebagaimana tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Perkembangan Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Semarang Tahun 2013 –2017

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Laki-laki	2,30	4,21	2,58	2,58	3,25
2	Perempuan	8,04	6,07	7,01	6,66	8,76
3	Total	5,25	5,17	4,87	4,67	6,09

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

1. Jumlah buta aksara tahun 2013 : 38.862 orang;
2. Jumlah buta aksara tahun 2014 : 38.955 orang;
3. Jumlah buta aksara tahun 2015 : 37.332 orang;
4. Jumlah buta aksara tahun 2016 : 36.415 orang;
5. Jumlah buta aksara tahun 2017 : 48.292 orang.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 11.877 orang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan sisa garapan sebagian besar adalah penduduk usia tua yang memang sudah tidak mampu untuk keluar dari buta aksara.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Semarang pada tahun 2016 tercatat sebesar 95,33 dan tahun 2017 sebesar 93,91. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Semarang yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini :

Tabel 5.2
Angka melek huruf penduduk dewasa usia 15 tahun ke atas
dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Semarang tahun 2013 - 2017

No	Angka Melek Huruf	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Laki-laki (%)	97,70	95,79	97,42	97,42	96,75
2	Perempuan (%)	91,96	93,93	92,99	93,34	91,24
3	Total (%)	94,75	94,83	95,13	95,33	93,91
4	Harapan Lama Sekolah	12.55	12.81	12.82	12.83	12.84

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

Dari data pada Tabel 5.2 di atas, dapat diketahui perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang bagi penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat dari sebesar 94,75 % (Tahun 2013) menjadi 95,33 % (Tahun 2016). Kondisi ini menggambarkan semakin banyak penduduk usia tersebut yang mampu membaca dan menulis. Namun demikian, masih ada kesenjangan angka melek huruf laki-laki dan perempuan walaupun perkembangan kesenjangannya semakin kecil. Pada tahun 2016 angka melek huruf laki-laki sebesar 97,42 % dan perempuan 93,34 %.

Angka melek huruf pada kelompok Pemuda usia 15-24 tahun di Kabupaten Semarang sejak tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Kesenjangan angka melek huruf laki-laki dan perempuan pada kelompok ini sangat kecil bahkan sejak tahun 2016 hingga saat ini capaian angka melek huruf laki-laki dan perempuan sebesar 100 % atau tuntas buta aksara. Secara lengkap data Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang Melek Huruf menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dapat disajikan dalam Tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut
Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Di Kabupaten Semarang Dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Jenis Kelamin	Usia	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
Laki-Laki	15 tahun ke atas	96,75	96,40
	15 – 24 tahun	100	99,82
	25 – 44 tahun	99,87	99,65
	45 tahun ke atas	91,96	91,54
Perempuan	15 tahun ke atas	91,24	90,50
	15 – 24 tahun	100	99,93
	25 – 44 tahun	99,86	99,36
	45 tahun ke atas	78,56	78,26
Total	15 tahun ke atas	93,91	93,39
	15 – 24 tahun	100	99,87
	25 – 44 tahun	99,87	99,50
	45 tahun ke atas	84,98	84,62

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

Dilihat dari data pada Tabel 5.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun mencapai 100% atau tuntas buta aksara. Angka Melek Huruf Kabupaten Semarang juga sedikit lebih tinggi dari Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,39 persen atau 0,52 persen dibawah AMH Kabupaten Semarang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang masih memiliki 6,09 persen penduduk yang belum dapat membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf, dimana sebagian besarnya adalah penduduk usia 45 tahun ke atas.

Selain peran pemerintah, perkembangan angka melek huruf yang tinggi ini tidak bisa lepas dari peran masyarakat lewat penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Perkembangan Presentase Kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.4
Prosentase Kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM
Kabupaten Semarang tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	PKBM					
1.1	Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM					
1.2	Jumlah Kecamatan	19	19	19	19	19
1.3	Persentase (%) kecamatan memiliki PKBM					
2	TBM					
2.1	Jumlah Kecamatan yang memiliki TBM					
2.2	Jumlah Kecamatan	19	19	19	19	19
2.3	Persentase (%) kecamatan memiliki TBM					
3	PKBM dan TBM					
3.1	Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM					
3.2	Jumlah Kecamatan	19	19	19	19	19
3.3	Persentase (%) kecamatan memiliki PKBM dan TBM					

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat Kabupaten Semarang yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat rata-rata lama sekolah Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2015-2017, masing- masing sebesar 7,33; 7,48 dan 7,87. Angka ini masih dibawah target program Wajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5
Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun
Kabupaten Semarang tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata – rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	7,26	7,31	7,33	7,46	7,87

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2017

Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,87 tahun dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Semarang telah menempuh pendidikan selama 7 - 8 tahun atau setara menduduki bangku kelas 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Secara umum permasalahan yang muncul pada keaksaraan fungsional adalah :

- a. Jumlah penduduk usia dewasa yang buta huruf masih cukup banyak;
- b. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan;
- c. Keterbatasan fasilitas, sarana-prasarana dan dana yang tersedia;
- d. Terbatasnya tenaga tutor yang berkualitas;
- e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.

C. Rencana Aksi Daerah

1. Kebijakan Pendidikan Keaksaraan

- a. Melibatkan peran serta masyarakat (PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama) dalam memberantas buta aksara;
- b. Membangun dukungan dengan pemerintah provinsi dan organisasi mitra lainnya dalam pelaksanaan program pendidikan keaksaraan;
- c. Mengembangkan diversifikasi layanan pembelajaran dengan prinsip keterjangkauan dan kemudahan akses bagi warga belajar.

2. Strategi Pelaksanaan

- a. Menekankan program pembinaan dan pelestarian melek aksara
- b. Penguatan akuntabilitas dalam pembinaan dan kemitraan;
- c. Mendorong pengembangan jaringan dan kemitraan;
- d. Menetapkan standar dan penjaminan mutu.

3. Program/Kegiatan

- a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan :
 - Mengupayakan pembentukan kelompok belajar tahap lanjutan / keaksaraan usaha sendiri bagi wajib belajar yang selesai tahap pemberantasan;
 - Meminimalisir warga belajar putus di tengah jalan;
 - Melaksanakan Gerakan Desa Bebas Buta Aksara secara optimal dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - Melaksanakan tahapan-tahapan keaksaraan fungsional secara sinergis dan berkelanjutan;
 - Mewujudkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk pembinaan dan pelestarian melek aksara;
 - Mendirikan Taman-taman bacaan masyarakat dan memperluas jangkauan perpustakaan desa dan perpustakaan keliling.

- b. Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan :
 - Meningkatkan jumlah dan kapasitas serta kompetensi tutor dan pengelola program keaksaraan;
 - Penyediaan modul untuk pendidikan keaksaraan fungsional;
 - Penyediaan bahan bacaan yang terkait dengan tahapan keaksaraan fungsional;
 - Pengintegrasian program keaksaraan fungsional dengan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan lokal;

- Peningkatan pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai pusat aktivitas program kegiatan penuntaan buta aksara;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keaksaraan fungsional secara periodik dan berkelanjutan;
 - Peningkatan program pendukung untuk mempertahankan kemampuan keaksaraan yang pernah diperoleh oleh lulusan sehingga dapat terus dipertahankan kemampuannya.
- c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik :
- Peningkatan system pengendalian program baik bagi penyelenggara program maupun pengelola program keaksaraan;
 - Mendorong komitmen kepala daerah kabupaten dalam mewujudkan penuntasan buta aksara sebagai prioritas kebijaksanaannya untuk mencapai target keaksaraan fungsional baik sasaran maupun waktu;
 - Penyediaan data secara valid, baik sebagai input, proses, maupun sebagai output untuk pelaporan program;
 - Pelaksanaan peningkatan intitusi pelayanan pendidikan keaksaraan pada kapasitas dan kompetensinya;
 - Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut program keaksaraan.

4. Sasaran/Target

Sasaran program pembinaan dan pelestarian melek aksara tahun 2018-2021 adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah dituntaskan pada tahap pemberantasan.

5. Target Prioritas dan Proyeksi Periode 2018-2021

Tabel 5.6
Target Prioritas dan Proyeksi Periode Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15 tahun ke atas (BPS) Tahun 2017 = 93,91	93,91	93,91	93,91	93,91
2.	Harapan Lama Sekolah Tahun 2017 = 12,84	12,85	12,86	12,87	12,88
3.	Persentase (%) kecamatan memiliki PKBM dan TBM	100	100	100	100
4.	Rata - rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (bps) Tahun 2017 = 7,87	7,35	7,36	7,37	7,38

BAB VI

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*LIFE SKILL*)

A. Pendahuluan

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) merupakan salah satu program pendidikan nonformal yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Badan kesehatan dunia WHO mendefinisikan bahwa kecakapan hidup merupakan sebuah keterampilan yang memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif. Dengan demikian memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif (Pusat Kurikulum Baitbang Depdiknas, 2004).

Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) merupakan bagian dari kesepakatan Incheon, artinya merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan dan dikembangkan guna mempersiapkan anak dalam menghadapi tantangan di masa depan, serta guna menghadapi kemungkinan tidak mampu melanjutkan jenjang lebih tinggi.

Adapun target Incheon adalah memastikan pada tahun 2030, sedikitnya $x\%$ remaja dan $y\%$ orang dewasa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi, teknik dan kejuruan, serta kursus dan pelatihan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan.

B. Analisis Situasi dan Kondisi Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan ketrampilan pemuda usia 15-24 tahun. Tujuannya adalah untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi siswa/pemuda;
2. Memperluas wawasan pola pikir guna meraih kesempatan kerja dan berusaha di masa depan;
3. Meningkatkan ketrampilan dan daya saing.

Gambaran tentang jumlah angkatan kerja di Kabupaten Semarang tahun 2016 - 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1
Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2016-2017
berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan (2016)					Jenjang Pendidikan (2017)				
		SD	SMP	SMA/SMK	Akademik (Diploma)	Univ.	SD	SMP	SMA/SMK	Akademik (Diploma)	Univ.
1	Ambarawa	12,613	7,092	7,735	661	1,620	14,614	7,263	7,968	680	1,697
2	Bancak	4,869	2,738	2,986	254	625	5,656	2,810	3,083	263	655
3	Bandungan	11,618	6,533	7,125	601	1,492	13,706	6,812	7,473	638	1,591
4	Banyubiru	8,997	5,059	5,518	469	1,157	10,343	5,141	5,638	481	1,200
5	Bawen	11,282	6,344	6,919	588	1,450	13,221	6,571	7,208	615	1,531
6	Bergas	13,603	7,649	8,342	709	1,748	15,911	7,908	8,675	740	1,847
7	Bringin	9,373	5,270	5,748	489	1,204	10,893	5,413	5,939	504	1,263
8	Getasan	10,480	5,893	6,427	547	1,349	12,108	6,018	6,601	563	1,405
9	Jambu	8,219	4,622	5,041	429	1,056	9,610	4,776	5,239	447	1,113
10	Kaliwungu	6,287	3,535	3,856	328	807	7,388	3,672	4,028	344	856
11	Pabelan	8,729	4,908	5,353	455	1,121	10,102	5,020	5,506	470	1,171
12	Pringapus	10,504	5,906	6,442	548	1,351	12,242	6,085	6,674	570	1,421
13	Sumowono	6,764	3,803	4,148	353	869	7,818	3,891	4,269	365	908
14	Suruh	14,040	7,895	8,610	732	1,803	16,465	8,183	8,965	763	1,911
15	Susukan	10,042	5,647	6,158	524	1,290	11,732	5,830	6,395	546	1,361
16	Tengaran	13,702	7,705	8,403	715	1,760	16,076	7,990	8,764	748	1,866
17	Tuntang	13,577	7,625	8,327	708	1,744	15,624	7,765	8,518	727	1,814
18	Ungaran Barat	15,749	8,856	9,656	825	2,024	18,875	9,390	10,299	874	2,191
19	Ungaran Timur	14,655	8,241	8,987	765	1,883	17,315	8,616	9,451	806	2,011
	Kabupaten	205,103	115,331	125,781	10,700	26,353	239,699	119,154	130,693	11,144	27,812

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang 2017, data diolah

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Kabupaten Semarang mengidentifikasi rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak berorientasi keterampilan menjadi faktor utama rendahnya daya saing dan kinerja. Selain itu hambatan utama datang dari kurangnya peluang peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja. Begitu juga halnya dengan kurang tersedianya peluang kursus atau pelatihan dan pendidikan menengah di pedesaan menjadi hambatan program diversifikasi ekonomi dan produktivitas angkatan kerja non pertanian. Jumlah Pengangguran terbuka Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 6. 2
Jumlah Pengangguran Terbuka per Kecamatan
Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Ambarawa	27,439	14,042	14,518
2	Bancak	10,056	5,421	5,618
3	Bandungan	17,723	12,935	13,616
4	Banyubiru	19,196	10,006	10,275
5	Bawen	24,008	12,561	13,133
6	Bergas	27,804	15,145	15,806
7	Bringin	21,090	10,435	10,820
8	Getasan	21,342	11,668	12,028
9	Jambu	17,916	9,151	9,546
10	Kaliwungu	13,868	7,001	7,339
11	Pabelan	18,051	9,719	10,035
12	Pringapus	21,009	11,694	12,162
13	Sumowono	13,965	7,531	7,778
14	Suruh	28,180	15,631	16,357
15	Susukan	21,030	11,180	11,653
16	Tengaran	28,671	15,255	15,970
17	Tuntang	29,493	15,116	15,521
18	Ungaran Barat	34,622	17,538	18,755
19	Ungaran Timur	31,324	16,316	17,223
	Kabupaten	426,787	228,345	238,153

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang 2017, data diolah

Kurangnya jumlah lulusan sekolah menengah atas/ sederajat dan perguruan tinggi yang bermutu serta rendahnya mutu/ relevansi program pendidikan di sekolah dan universitas juga dianggap sebagai faktor yang menghambat penyerapan tenaga kerja dan penyumbang tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan yang miskin adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus dan pelatihan yang sesuai dengan potensi daerah sehingga mereka dapat bekerja atau berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.

Langkah awal yang penting untuk memfasilitasi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan sepanjang hayat adalah dengan meningkatkan angka melanjutkan ke pendidikan menengah. Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP ke SMA/ SMK telah mendorong peningkatan kinerja nasional. Dalam jangka panjang, meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah yang berkualitas memungkinkan peningkatan angka melanjutkan baik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bentuk-bentuk kursus dan pelatihan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi sekolah menengah kejuruan dan pendidikan teknik.

Pemerintah Kabupaten Semarang juga telah berupaya memperkuat orientasi kecakapan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan cara mengaitkannya dengan aspek-aspek lingkungan, HIV/AIDS, kewarganegaraan dan aspek sosial dalam memperbaiki kurikulum sekolah dan ujian. Dengan demikian, sekolah terdorong untuk memasukkan komponen lokal kedalam kurikulum sebagai bagian dari desentralisasi kurikulum dan tanggapan bagi konteks lokal dan lingkungan. Sekolah juga terdorong untuk bekerja sama dengan sektor-sektor lain, seperti kesehatan, lingkungan, industri, dan perdagangan baik dalam kegiatan inti ataupun ekstrakurikuler. Dalam beberapa kasus, sekolah terdorong untuk memanfaatkan dana sekolah dalam memfasilitasi kegiatan kecakapan hidup dalam sebuah program unggulan/inti.

Pendidikan nonformal merupakan langkah penting dalam menyediakan alternatif pendidikan bagi para pemuda/i dan orang dewasa yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Pada pendidikan nonformal, pendidikan kecakapan hidup (PKH) diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program yang dilaksanakan antara lain: PKH, PKH untuk wanita, aksara kewirausahaan mandiri, serta berbagai jenis kursus dan pelatihan ketrampilan lainnya.

Tabel 6. 3
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ambarawa	4	4	4	2	2
2	Bancak	-	-	-	-	-
3	Bandungan	1	1	1	-	-
4	Danyubiru	-	-	-	-	-
5	Bawen	3	3	4	4	4
6	Bergas	2	2	2	1	1
7	Bringin	2	2	1	1	1
8	Getasan	-	-	-	-	-
9	Jambu	-	-	-	-	-
10	Kaliwungu	-	-	-	-	-
11	Pabelan	-	-	-	-	-
12	Pringapus	-	-	-	-	-
13	Sumowono	1	1	-	-	-
14	Suruh	2	2	2	2	2
15	Susukan	-	-	-	-	-
16	Tengaran	5	5	5	5	5
17	Tuntang	-	-	-	-	1
18	Ungaran Barat	5	5	5	5	5
19	Ungaran Timur	-	-	3	3	3
	Kabupaten	25	25	27	23	24

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2017

Tabel 6. 4
Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ambarawa	440	660	528	418	484
2	Bancak					
3	Bandungan	132	88	110	-	-
4	Banyubiru					
5	Bawen	270	231	380	312	352
6	Bergas	240	198	308	154	132
7	Bringin	176	132	110	143	165
8	Getasan					
9	Jambu					
10	Kaliwungu					
11	Pabelan					
12	Pringapus					
13	Sumowono	99	55			
14	Suruh	440	396	484	396	462
15	Susukan					
16	Tengaran	1.100	990	1.045	825	770
17	Tuntang					66
18	Ungaran Barat	1.375	1.210	1.100	1.045	990
19	Ungaran Timur			528	396	495
	Kabupaten	4.272	3.960	4.593	3.689	3.916

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2017

Beberapa jenis pelatihan keterampilan yang dilaksanakan pada pendidikan nonformal antara lain: Komputer, otomotif, menjahit, tata rias rambut, tata kecantikan kulit, tehni HP, las dan keterampilan lainnya. Secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 6.5 di bawah ini :

Tabel 6.5
Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan
Pada Tahun 2016 dan 2017

NO	Jenis Pelatihan	Satuan	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	<i>Pelatihan Ketrampilan</i>			
	• Menjahit Modista	Orang	0	16
	• Komputer	Orang	0	20
	• Menjahit high speed/Garment	Orang	80	0
	• Mekanik sepeda motor	Orang	56	40
	• Mekanik mobil	Orang	0	0
	• Las listrik/karbit	Orang	0	0
	• Bordir	Orang	60	20
	• Sablon	Orang	0	16
	• Potong Rambut	Orang	0	20
	• Pembuatan rambut palsu/Wig	Orang	0	20
	• Aneka kerajinan(pembuatan Boneka)	Orang	0	0
	• Tata rias pengantin	Orang	36	20
	• Pembuatan jamur	Orang	0	0
	• Aneka makanan Kecil	Orang	0	0
	• Service Hp	Orang	20	0
	• Sulam benang / pita	Orang	0	0
	• Operator Garmen	Orang	16	80
	• Mekanik mesin jahit	Orang	0	16
	Jumlah	Orang	268	268

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa tambahan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dibanding Tahun 2016, terutama pelatihan yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Semarang contohnya pelatihan menjahit modista, komputer, mekanik mesin jahit, sablon, potong rambut dan pembuatan rambut palsu (wig). Adapun Jumlah dan persentase Pengangguran Yang Terlayani Pendidikan Kecakapan Hidup di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 6.6. di bawah ini :

Tabel 6.6
Jumlah dan persentase Pengangguran Yang Terlayani PKH
Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	2015		2016		2017	
		Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
1	Ambarawa	25,332	92.32	6,635	47.25	6,542	45.06
2	Bancak	8,815	87.66	2,561	47.25	2,531	45.06
3	Bandungan	11,477	64.76	6,113	47.26	6,135	45.06
4	Banyubiru	17,382	90.55	4,723	47.20	4,630	45.06
5	Bawen	21,682	90.31	5,935	47.25	5,918	45.06
6	Bergas	24,120	86.75	7,156	47.25	7,122	45.06
7	Bringin	20,141	95.50	4,931	47.25	4,875	45.06
8	Getasan	18,444	86.42	5,513	47.25	5,420	45.06
9	Jambu	16,574	92.51	4,324	47.25	4,301	45.06
10	Kaliwungu	12,983	93.62	3,309	47.26	3,307	45.06
11	Pabelan	15,843	87.77	4,592	47.25	4,522	45.06
12	Pringapus	17,832	84.88	5,525	47.25	5,480	45.06
13	Sumowono	12,238	87.63	3,558	47.25	3,507	45.09
14	Suruh	24,007	85.19	7,386	47.25	7,374	45.08
15	Susukan	18,691	88.88	5,283	47.25	5,250	45.05
16	Tengaran	25,463	88.81	7,208	47.25	7,196	45.06
17	Tuntang	27,190	92.19	7,142	47.25	6,994	45.06
18	Ungaran Barat	32,302	93.30	8,288	47.26	8,449	45.05
19	Ungaran Timur	28,414	90.71	7,709	47.25	7,766	45.09
	Jumlah	378,930	88.41	107,892	47.25	107,319	45.06

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2017

Dari tabel 6.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase pengangguran yang terserap dan terlayani program pendidikan kecakapan hidup mengalami peningkatan walaupun jumlahnya masih relative kecil.

C. Rencana Aksi Daerah

1. Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup

Dilaksanakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah :

- a. Pengembangan Keunggulan dan Kemitraan
- b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup adalah Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah, pendidikan keterampilan untuk pemuda dan anak putus sekolah, pengembangan kualitas tenaga kerja masyarakat.

3. Program/Kegiatan

(1.) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan-kegiatan :

- (a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, dengan tujuan : terlaksananya pelatihan menjahit modista, salon dan mekanik mesin jahit;
- (b) Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat, dengan tujuan : terlaksananya pelatihan potong rambut, mekanik sepeda motor, Tata rias Pengantin, Menjahit Garmen, pembuatan rambut palsu (wig), komputer dan Bordir.

(2.) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan berupa penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, dengan tujuan : Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan/TKA, terlaksananya pembuatan blanko-blanko untuk pencari kerja, terlaksananya monitoring TKA, mempertemukan pengguna dengan pencari kerja.

4. Sasaran/Target

- a. Meningkatkan APK diklat profesional dan teknik;
- b. Meningkatkan angka melek huruf pemuda (15-24 tahun);
- c. Meningkatkan pelatihan dan kursus-kursus keterampilan;
- d. Penyelenggaraan diklat magang untuk pemuda potensial;
- e. Pengembangan Kejuruan pada Balai Latihan Kerja;
- f. Penyelenggaraan KBU.

5. Target Prioritas dan Proyeksi 2018-2021

Target Kabupaten Semarang disesuaikan dengan Target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum pada tabel 6.7 di bawah ini :

Tabel 6.7
Target Prioritas & Proyeksi Kabupaten Semarang
Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017 = 79,47	73,20	73,30	73,40	73,50
2	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun 2017 = 3,43	5,19	5,66	5,89	6,21
3.	Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2017 = 76,53	16	19	20	22
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 = 1,93	1,93	3,80	3,65	3,50
5.	Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2017 = 78,04	79	81	83	84

B A B VII

PENDIDIKAN HOLISTIK BERBASIS KARAKTER

A. Pendahuluan

Sasaran kelima program Pendidikan Untuk Semua (PUS)/Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) adalah; pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan, termasuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan Global dan Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan. Sasaran kelima ini bisa diwujudkan dengan konsep pendidikan yang bersifat holistik. Konsep pendidikan holistik merupakan konsep pendidikan yang mendorong pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya; baik itu spritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa dan lain-lain. Dimana konsep pendidikan holistik di sini adalah konsep pendidikan yang unggul dan terdepan untuk memberdayakan potensi manusia seutuhnya. Spirit pendidikan holistik sesungguhnya mendorong semua aspek kehidupan manusia tersebut menuju ke arah yang lebih baik.

Tujuan pendidikan holistik, seperti yang dikatakan oleh J. Krishnamurti, adalah *“The highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole”* (Fungsi terpenting pendidikan adalah menghasilkan manusia yang terintegrasi, yang mampu menyatu dengan kehidupan sebagai satu kesatuan).

Indonesia Heritage Foundation, yayasan yang bergerak dalam bidang Character Building (Pendidikan Karakter) menyatakan bahwa pengembangan pendidikan holistik difokuskan untuk menanamkan 9 pilar karakter, yaitu :

1. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya
2. Tanggung jawab, Kedisiplinan, dan Kemandirian
3. Kejujuran
4. Hormat dan Santun

5. Kasih Sayang, Kepedulian, dan Kerjasama
6. Percaya Diri, Kreatif, Kerja Keras, dan Pantang Menyerah
7. Keadilan dan Kepemimpinan
8. Baik dan Rendah Hati
9. Toleransi, Cinta Damai, dan Persatuan

Pembelajaran holistik terjadi apabila kurikulum dapat menampilkan tema yang mendorong terjadinya eksplorasi atau kejadian-kejadian secara autentik dan alamiah. Dengan munculnya tema atau kejadian yang alami ini akan terjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna dan materi yang dirancang akan saling terkait dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam kurikulum.

Kurikulum yang digunakan adalah “Kurikulum Holistik Berbasis Karakter” (*Character-based Integrated Curriculum*), yaitu kurikulum terpadu yang “menyentuh” semua aspek kebutuhan anak. Sebuah kurikulum yang terkait, tidak terkotak-kotak dan dapat merefleksikan dimensi, keterampilan, dengan menampilkan tema-tema yang menarik dan kontekstual.

D. Rencana Aksi Daerah

1. STRATEGI

Strategi untuk mengembangkan pendidikan holistik berbasis karakter adalah :

- 1). Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya (*student active learning, contextual learning, inquiry based learning, integrated learning*);

- 2). Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (*conducive learning community*) sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan memberikan semangat;
- 3). Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan melalui pendidikan agama dan ekstrakurikuler Pramuka;
- 4). Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga 9 aspek kecerdasan manusia;
- 5). Penguatan karakter siswa melalui pembinaan dan koordinasi dengan komite sekolah.

2. TARGET KABUPATEN SEMARANG 2018 – 2021

Tabel 7.1
Target Kabupaten Semarang Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1.	Penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah (%)	100	100	100	100

BAB VIII

MUTU GURU

A. Pendahuluan

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen pemerintah Indonesia yang diimplementasikan melalui berbagai kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab bersama ketiga unsur tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mendefinisikan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Konsep utama penjaminan mutu pendidikan pada permendiknas ini adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Oleh karena itu sangat diperlukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, karena pendidikan nasional merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

B. Analisis Situasi dan Kondisi Mutu Guru

Pada aspek peningkatan mutu guru; beberapa hal yang dapat dijadikan ukuran capaian kinerja adalah :

1. Prosentase Pendidik berkualifikasi S1/DIV

Berkaitan dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa semua guru dan pengelola sekolah, paling rendah

berkualifikasi S-1 dan D-4 serta memiliki sertifikat kompetensi. Pada tahun 2017, di Kabupaten Semarang jumlah guru PAUD tercatat sebanyak 1.998 orang, dan yang memenuhi kualifikasi sebanyak 1.521 orang (76,13%); jumlah guru SD/MI sebanyak 4.711 orang, yang memenuhi kualifikasi sebanyak 4.261 (90,45%) dan jumlah guru SMP/MTs sebanyak 1.817 orang, yang memenuhi kualifikasi sebanyak 1.718 orang (94,55%). Dari rincian tersebut berarti masih cukup banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi, secara lengkap disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8.1
Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi
Di Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PAUD							
1.2	Guru berkualifikasi S1/D-IV PAUD	-	-	5.711	6.404	6.984	1.300	1.521
1.2	Jumlah Guru PAUD	1.718	1.759	8.767	8.679	8.730	1.946	1.998
1.3	Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV PAUD	48,78	52,67	65,14	73,76	80,00	66,80	76,13
2	SD/MI							
2.1	Guru berkualifikasi S1/D-IV PGSD	-	-	-	2.430	3.019	4.691	4.261
2.2	Jumlah Guru SD	5.593	5.539	-	2.689	5.381	5.377	4.711
2.3	Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SD/MI	84,95	87,04	88,82	90,37	56,10	87,24	90,45
3	SMP/MTs							
3.1	Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV	-	-	2.376	2.430	2.463	2.573	1.718
3.2	Jumlah Guru SMP/MTs	2.034	2.026	2.675	2.689	2.725	2.796	1.817
3.3	Persentase guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	-	-	88,82	90,36	90,38	92,02	94,55

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Semarang, 2017

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Guru

Berkenaan dengan peningkatan mutu guru, Kerangka Aksi Dakar dan Incheon tidak memberikan target kuantitatif secara eksplisit. Hanya disebutkan bahwa pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik. Terkait dengan peningkatan mutu guru, salah satu pencapaian yang signifikan adalah guru yang bersertifikasi. Menurut Shoimin (2013:81), Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, guru yang sudah bersertifikasi semestinya adalah seorang guru yang bermutu atau berkualitas.

Data jumlah guru yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi pendidik di Kabupaten Semarang, pada tahun 2017 sebanyak 782 guru TK/RA-BA sudah mendapatkan sertifikasi, 3.551 guru SD/MI sudah bersertifikasi dan 1.544 guru SMP/MTs sudah bersertifikasi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8.2 di bawah ini :

Tabel 8.2
Kualifikasi dan Sertifikasi Guru di Kab Semarang
Tahun 2015 - 2017

NO	SATUAN PENDI- DIKAN	2015				2016				2017			
		KUALIFIKASI		SERTIFIKASI		KUALIFIKASI		SERTIFIKASI		KUALIFIKASI		SERTIFIKASI	
		<S-1 /D-4	>S-1 /D-4	SUDAH	BELUM	<S-1 /D-4	>S-1 /D-4	SUDAH	BELUM	<S-1 /D-4	>S-1 /D-4	SUDAH	BELUM
1	TK/RA-BA	-	-	-	-	646	1.300	521	1.308	477	1.521	782	1.216
2	SD/MI	1.746	6.984	3.019	2.362	818	6.000	2.427	5.377	545	5.548	3.551	6.093
3	SMP/MTs	305	2.463	1.180	921	223	2.573	872		156	2.243	1.544	855

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam penguatan tata kelola adalah dengan meningkatkan mutu laporan/administrasi dan pertanggungjawaban para guru yang lebih transparan dan dapat dipercaya terhadap pelaksanaan pendidikan. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan di daerah.

Dalam bidang pendidikan, akuntabilitas pendidikan menurut Gorton (Agus Wibowo, 2013:48) merupakan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu syarat terciptanya pendidikan yang baik dan terpercaya. Faktor penting yang mempengaruhi akuntabilitas pendidikan adalah akuntabilitas para gurunya.

Bentuk akuntabilitas guru dalam pendidikan terhadap orangtua siswa adalah nilai yang diberikannya. Ketika seorang guru telah melaporkan hasil penilaiannya dalam laporan bentuk hasil belajar siswa, maka yang bersangkutan telah melaksanakan akuntabilitas pendidikan berdasar bidang tugasnya. Bentuk akuntabilitas guru yang lain adalah setiap hendak mengajar membuat Silabus Pembelajaran, Rencana Program Pembelajaran, mempersiapkan bahan ajar dan sebagainya. Guru juga perlu memiliki akuntabilitas kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogic, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Citra Publik guru tidak kalah penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik dimasyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Namun masih terdapat permasalahan terkait dengan peningkatan mutu guru, yaitu : (1) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV khususnya di pendidikan PAUD masih rendah. Guru ini terdiri dari guru PNS dan Non PNS; (2). guru yang bersertifikasi masih kurang; (3). Masih tingginya prosentase guru yang belum memiliki kompetensi.

4. Rencana Aksi Daerah

1. Kebijakan Peningkatan Mutu Guru

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait mutu guru;
- b. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) terkait mutu guru;

2. Strategi Pelaksanaan

Upaya untuk meningkatkan mutu Guru dititikberatkan pada :

- a. Peningkatan Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV;
- b. Peningkatan prosentase guru yang mendapatkan sertifikasi;
- c. Peningkatan prosentase guru yang lulus uji kompetensi;

3. Program/Kegiatan

Program pelaksanaan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu guru yaitu : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik;
- b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Sasaran/Target

Berkenaan dengan mutu guru, Kesepakatan INCHEON belum memberikan target kuantitatif secara eksplisit. Berkaitan dengan sasaran/target mutu guru, pada RAD PUS/PSH ini Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun target dengan menyesuaikan dokumen RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021, yaitu terkait dengan prosentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4.

5. Target Prioritas dan Proyeksi tahun 2018-2021

Tabel 8.3
Target Prioritas & Proyeksi Kabupaten Semarang
Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	Persentase guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D4	64,75	65,52	66,27	66,50
2	Persentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	85,03	85,05	85,07	85,30
3	persentase pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	94,20	94,30	94,40	94,50
4	Persentase guru TK/RA bersertifikat pendidik	43,09	45,62	48,10	48,35
5	Persentase guru SD/MI bersertifikat pendidik	57,96	59,80	61,65	61,75
6	Persentase guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	64,21	64,93	66,11	66,30

BAB IX

BELANJA PUBLIK UNTUK PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Dalam konteks pendidikan nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan). Target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yaitu pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6 persen dari *produk domestik bruto* (PDB) atau 15-20 persen dari belanja publik untuk pendidikan, dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan negara yang paling membutuhkan.

Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi sayang, amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik.

Orang tua/wali peserta didik (khususnya bagi peserta didik tingkat SLTA ke bawah). bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik yaitu biaya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif dari peserta didik itu sendiri, seperti: transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku penunjang, kursus tambahan, dan sejenisnya. Selain itu, orang tua/wali peserta

didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan, yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Biaya pendidikan dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu biaya investasi dan biaya operasi.

1. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi guru termasuk ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai.
2. Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non personalia, antara lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah (ATS), Bahan dan Alat Habis Pakai yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasa transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstra kurikuler.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berikut ini dijelaskan secara singkat keempat prinsip tersebut:

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya

harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah dana yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja dana tersebut.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola pendidikan, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

3. Efektivitas

Efektivitas menekankan pada kualitatif hasil suatu kegiatan. Pengelolaan dana pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomenya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- Dilihat dari segi hasil, Kegiatan pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

B. Analisis Situasi dan Kondisi Belanja Publik Untuk Pendidikan

1) Pendanaan PAUD 2017

No	Program / Kegiatan	2017
1.	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	15.000.000
	-SKB Susukan-APBD II	5.000.000
	-SKB Ungaran - APBD II	5.000.000
	-TKN Pembina Bergas - APBD II	5.000.000
2.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Sarpras PNF-APBD II)	45.000.000
3.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	67.743.000
4.	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	80.439.000
	-Lomba Seksi PAUD-APBD II	25.621.000
	-Lomba Gugus PAUD Seksi PAUD-APBD II	19.818.000
	-GOP TKI-APBDII	35.000.000
5.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	36.000.000
	-TK Pembina Bergas – BOP PAUD	36.000.000
6.	Pengembangan kur, bahan ajar dan model pembelajaran paud	38.172.000
	-Seksi PAUD-APBDII	38.172.000

No	Program / Kegiatan	2017
7.	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	9.761.000
	-Seksi PAUD - APBD II	9.761.000
8.	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	100.768.000
	-Ajang Kreativitas - Seksi PAUD - APBD II	67.187.000
	-Bunda Paud- Seksi PAUD - APBD II	33.581.000
9.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.780.000
	Monev Ijin Pendirian Sekolah -Seksi Paud - APBD II	9.780.000
	Monev Sarpras PAUD - APBD II	5.000.000

2) Pendanaan Dikdas 2017

No	Program / Kegiatan	2017
1	Penambahan ruang kelas sekolah	474.587.000
2	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	284.489.000
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	395.950.000
4	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	1.109.770.000
5	Pengadaan Buku dan alat tulis siswa	3.520.962.000
6	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	408.800.000
7	Pengadaan meubelair sekolah	5.609.981.000
8	Pengadaan perlengkapan sekolah	726.021.000
9	Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	7.558.251.000
10	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	5.793.682.000
11	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	46.855.000
12	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	86.762.000
13	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	59.291.000
14	Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan	81.829.079.000

No	Program / Kegiatan	2017
15	Pengembangan sekolah (pelatihan sekolah inklusi)	177.549.000
16	Penyelenggaraan paket B setara SMP	229.279.000
17	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	860.176.000
18	Pengembangan materi belajar mengajar dengan metode pembelajaran	516.833.000
19	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	469.322.000
20	Penyediaan bea siswa kurang mampu	1.635.353.000
21	Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi	328.591.000
22	Penggunaan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	295.264.000
23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19.281.000

3) Pendanaan Pendidikan keaksaraan 2017

No	Program / Kegiatan	2017
1	Pengembangan pendidikan keaksaraan -Seksi Dikmas - APBD II	177.295.000

4) Pendanaan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 2017

No	Program / Kegiatan	2017
1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	19.922.000
	-UPTD SKB Susukan - APBD II	10.000.000
	-UPTD SKB Ungaran - APBD II	9.922.000

5) Pendanaan Mutu Pendidikan 2017

No	Program / Kegiatan	2017
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik (Bidang Tendik)	18.348.000
2	Pengembangan mutu & kualitas program pendidikan & pelatihan bagi pendidik & tenaga kependidikan	389.961.000

Tabel 9.1
Jumlah Siswa miskin yang mendapat bantuan

Jenjang	2014	2015	2016	2017
SD				
Siswa miskin yang memperoleh bantuan	-	-	27.859	30.700
Jumlah siswa miskin	-	-	31.275	31.469
%	-	-	89,08	97,56
SMP				
Siswa miskin yang memperoleh bantuan	12.193	13.387	15.765	16.836
Jumlah siswa miskin	12.355	14.005	18.333	17.363
%	98,70	95,60	85,99	96,96

Tabel 9.2
Jumlah Siswa miskin yang mendapat bantuan dan berprestasi

Jenjang	2014	2015	2016	2017
SD				
Siswa miskin yang memperoleh bantuan dan berprestasi				
Jumlah siswa miskin				
%				

Jenjang	2014	2015	2016	2017
SMP				
Siswa miskin yang memperoleh bantuan dan berprestasi	-	-	56	112
Jumlah siswa miskin	12.355	14.005	18.333	17.363
%	-	-	0,0030	0,0064

C. **Rencana Aksi Daerah**

Tabel 9.3
Target Prioritas & Proyeksi Kabupaten Semarang
Tahun 2018-2021

NO	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Persentase anggaran pendidikan terhadap APBD Kabupaten Semarang tahun 2017 : 34,97	33,17	34	34,5	35
2.	Persentase jumlah siswa miskin SD/MI penerima beasiswa th 2017 : 97,56	93,24	94,59	95,89	97,20
3	Persentase jumlah siswa miskin SMP/MTs penerima beasiswa th 2017 : 96,96	91,66	93,34	95,02	96,70
4	Persentase jumlah siswa SD dari keluarga miskin yang memiliki prestasi	0,5	0,7	0,9	1
5	Persentase jumlah siswa SMP dari keluarga miskin yang memiliki prestasi	0,5	0,7	0,9	1
6	Persentase peningkatan penyaluran beasiswa miskin	4,88	5,13	5,18	5,32

BAB X

PENUTUP

Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*) adalah hasil pertemuan Forum Pendidikan Dunia di Kota Dakar Senegal pada tahun 2000 yang dilanjutkan dengan program Pendidikan Sepanjang Hayat (*Long Life Education*) dari hasil kesepakatan Forum Pendidikan Dunia di Kota Incheon, Korea Selatan pada tahun 2015. Pendidikan Sepanjang Hayat juga merupakan tujuan ke 4 (empat) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *SDG's (Sustainable Development Goals)* yaitu "Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua".

Untuk Kabupaten Semarang, Pendidikan Untuk Semua/Pendidikan Sepanjang Hayat juga tertuang dengan jelas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang yaitu dalam Misi ke-1 (satu) Bupati dan Wakil Bupati Semarang : "Meningkatkan Kualitas SDM yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi".

RAD PUS 2018-2021 ini merupakan salah satu dokumen panduan guna mencapai kesepakatan Incheon 2015. Secara berkesinambungan, pada saatnya rencana aksi ini akan dievaluasi pada akhir tahun rencana aksi. Sebagai suatu dokumen panduan, RAD ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya utamanya di dalam menyusun perencanaan kebijakan pembangunan pendidikan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud sinergitas antara seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN